

e-news letter

MAR II 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Kasus Positif
Corona Bertambah
**PEMERINTAH
HARUS LEBIH
SIAP**





Menghitung Hari, Berjuang Sendiri-Sendiri



Negara sejatinya dalam bertindak harus melampaui cara pribadi, baik berkerja maupun berpikir. Agar pada akhirnya hal-hal yang tidak bisa dilakukan pribadi, bisa ditutupi oleh Negara. Negara punya infrastruktur dan suprastruktur yang tidak dimiliki oleh pribadi. Namun apa yang terjadi dalam penanganan Covid-19 sejak awal suspect pertama kali diungkap tanggal 2 maret 2020, Negara seperti gagap dan gamang. Padahal pergerakan virus ini sangat cepat dan sulit di deteksi, namun langkah yang dilakukan

sangat biasa. Tercatat pasien positif terjangkit virus corona kembali bertambah sebanyak 21 kasus, per Minggu total terdapat 117 kasus (15/3/2020).

Dalam menangani persoalan Covid-19 Kepala Pemerintahan nampak enggan hadir sebagai kepala Negara, yang sikapnya dibutuhkan agar mampu melampaui pribadi. Memimpin paling depan dalam menyelesaikan krisis ini, memberi arahan dan panduan yang jelas. Muncul secara rutin dan konsisten menyampaikan pesan optimisme serta langkah-

langkah yang telah, sedang dan akan disiapkan untuk melewati orong gelap.

Pernahkan kita lihat kepala pemerintahan sejak awal mengumpulkan seluruh kepala daerah atau kepala lembaga terkait antisipasi virus corona? Pernah, tapi untuk urusan investasi. *Ambiyar!*, dilalahnya saat negara-negara lain tergopoh-gopoh menangani virus mematikan ini, malah kita sempat membuat seruan masuk orang asing masuk ke Indonesia dengan beragam insentif. Jangan jauh-jauh bicara mitigasi, layanan *call centre* dan *hotline service* yang disediakan oleh Pemerintah faktanya sangat sulit dihubungi dan mendapatkan jawaban. Tidak jarang hanya nada dering. Protokol krisis kita tidak siap dan tidak aktif.

Saat ini para Gubernur dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) nampak kebingungan dalam mengambil sikap. Perlahan sejumlah kasus muncul di daerah mereka dan merebak luar biasa. Angka bergerak terkerek cepat, memantuk kuat hingga ke atas puncak. Temuan kasus sudah berkerja dalam deret ukur, bukan deret

Dalam menangani persoalan Covid-19 Kepala Pemerintahan nampak enggan hadir sebagai kepala Negara, yang sikapnya dibutuhkan agar mampu melampaui pribadi. Memimpin paling depan dalam menyelesaikan krisis ini, memberi arahan dan panduan yang jelas.

hitung. Melompat dengan cepat. Pada akhirnya setiap Kepala daerah mengambil inisiatif sendiri dengan melakukan lockdown terhadap kota mereka, malampaui apa yang tidak dilakukan pusat. Melakukan tes dan uji sendiri, karena hasil lab yang sentralistik menyebabkan mereka kesulitan memitigasi dan mengisolasi wabah dengan cepat.

Sejak kasus awal Corona terjadi di Wuhan, sikap Pemerintahan nampak menyepelekan urusan. Berbagai statement menteri dan pejabat, nampak menyederhanakan urusan. Dus, fakta membuktikan negara-negara yang bersikap "abay dan lalay" seperti itu akhirnya menjadi korban paling parah di luar china seperti Italia dan Iran. Haruskah ini terjadi di Indonesia, negara dengan awalan "I" lainnya dan menjadi sebuah

mitos.

Masih ada waktu untuk memutus mata rantai kegagalan ini, salah satunya dengan fokus serta perhatian dari kepala Pemerintahan yang menjadi "koentji" utama. Warga masyarakat kita unik, maka perlu pendekatan yang tidak biasa. Mereka tidak panik, padahal jumlah positif corona sudah menembus angka 100 dalam kurun waktu singkat. Perintah Isolasi dimaknai rekreasi. Ini sikap mental yang bagus dalam skala awam, namun situasi ini bisa menjadi petaka jika dipandang dengan arah berpikir sebaliknya bahwa kita terlalu "sulit" diatur. Mari berubah...

Humas Fraksi PKS DPR RI



Kasus Positif Corona Bertambah, Pemerintah Harus Lebih Sigap

"Bertambahnya kasus positif harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita berdoa dan terus berusaha agar jumlah korban jangan bertambah

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (10/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani di sela kegiatan Temu Tokoh Perempuan Kota Cirebon meminta pemerintah lebih sigap menangani Covid-19. Permintaan Netty menanggapi maklumat pemerintah terkait bertambah 13 pasien positif Corona sehingga menjadi 19 kasus.

"Pengumuman ini cukup mengagetkan. Saya berempati dan turut mendoakan agar pasien segera sembuh dengan penanganan yang baik. Mari kita dukung dengan pikiran dan jiwa positif, mulai dari dukungan keluarga dan masyarakat. Prevalensi

kesembuhan covid-19 di seluruh dunia jauh lebih banyak dibandingkan yang meninggal," ujar Netty di Hotel Zamrud, Cirebon.

Menurut Netty, mengutip data John Hopkins CSSE per 8 Maret, jumlah kasus covid-19 tercatat 107.726 kasus terkonfirmasi di seluruh dunia, dan 3.656 kasus meninggal, serta kesembuhan tercatat 60.660 kasus.

Netty, politisi PKS dari Dapil Cirebon dan Indramayu, menambahkan pada masa reses ini terus menyosialisasikan penanganan virus Corona. "saya terus

menyosialisasikan dan melakukan pemantauan perkembangan kasus Corona terutama di Cirebon dan Indramayu. Kemarin saya sudah meninjau kesiapan RS Gunung Jati sebagai salah satu RS rujukan penanganan Corona di Jawa Barat," imbuhnya.

Netty berharap mekanisme penanganan kasus Corona di Indonesia dilakukan sesuai protokol.

"Meski pemerintah telah membuat protokol pengawasan mulai dari protokol komunikasi publik, protokol kesehatan, protokol perbatasan, protokol area pendidikan dan transportasi publik, saya tetap meminta pemerintah lebih sigap dan tegas," tambahnya.

"Keterlambatan penanganan protokol komunikasi publik dapat berimplikasi ke banyak hal. Misalnya, masyarakat tidak mendapat informasi yang utuh tentang Covid-19 dan penanganannya. Masyarakat terjebak berita hoax dan panik. Terjadilah rush buying masker



dan hand sanitizer. Seharusnya sejak awal kasus ini muncul dan pandemic dari WHO, pemerintah sudah mulai membuat protokol pencegahan. Dengan adanya kasus positif Corona, maka protokolnya menjadi penanganan atau kuratif," himbau Netty.

Selain Indonesia, tercatat 107 negara terkonfirmasi kasus Corona. Sebut saja, Korea Selatan, AS, Jepang, Jerman, Inggris dan Singapura.

"Bertambahnya kasus positif harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk

meningkatkan kewaspadaan. Kita berdoa dan terus berusaha agar jumlah korban jangan bertambah,"katanya.

Netty meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberi akses informasi pada masyarakat.

"Jangan karena ingin menjaga stabilitas dan menghindari kepanikan masyarakat, hak masyarakat untuk tahu kebenaran jadi terhalangi. Akibatnya rakyat menjadi korban hoax dan fake news tentang covid-19," ujar Netty mengakhiri.

Terkait Virus Corona, Anggota DPR RI Tinjau Kesiapan RSUD di Bandung

Jadi, saya melihat memang harus ada kesiapan khusus untuk RSUD-RSUD ini, jangan sampai jika ada kasus tidak terdeteksi dari awal, Virus Corona tidak hanya menginfeksi orang asing, melainkan bisa pula menginfeksi masyarakat Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan orang asing

dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av

Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Jawa Barat II

Bandung (10/03) — Anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat melakukan peninjauan guna memastikan kesiapan rumah sakit di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, dalam menangani masalah Virus Corona(Covid 19).

Di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Adang Sudrajat memantau kesiapan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang. Sementara di Kota Bandung, pihaknya memantau kesiapan di dua

rumah sakit di Jawa Barat yang dijadikan rumah sakit rujukan nasional untuk penanganan pasien Virus Corona, yakni, Rumah Sakit Rotinsulu Bandung dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Kita sudah meninjau rumah sakit yang menjadi rujukan nasional, Rotinsulu dan RSHS. Di situ dilihat kesiapan mereka khususnya dalam penanganan pasien suspect corona di Jawa Barat," kata Adang ditemui di RSUD

Lembang, Bandung Barat, Senin (09/03/2020).

"Dan karena saya dapilnya di Jabar II yakni, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, maka saya melihat kesiapan RSUD-nya juga," lanjut Adang.

Adang menjelaskan tinjauannya ke RSUD Lembang karena Lembang telah menjadi mudik pengunjung wisatawan lokal hingga mancanegara. Sehingga, pihaknya ingin memastikan kesiapan medis khususnya dalam mengantisipasi penyebaran serta penanganan pasien virus corona.

"Jadi, saya melihat memang harus ada kesiapan khusus untuk RSUD-RSUD ini, jangan sampai jika ada kasus tidak terdeteksi dari awal," tandasnya.

Menurutnya, Virus Corona tidak hanya menginfeksi orang asing, melainkan bisa pula menginfeksi masyarakat Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan orang asing.

Oleh karena itu, kesiapan



SDM mulai dari rumah sakit di tingkat daerah hingga tingkat nasional harus memiliki pemahaman yang mumpuni, agar sigap dalam melakukan penanganan terhadap pasien.

"Jika ada gejala-gejala yang terkait virus corona ini saya ingin melihat kesiapan SDM-nya juga. Apa terkondisikan bisa mengaudit dari awal, sehingga apa yang dilakukan setelahnya itu sudah sigap. Jangan sampai orang udah kemana-mana baru tahu, oh ternyata positif," ungkapnya.

Dengan pemahaman yang memadai, kata dia, tim medis akan cepat tanggap dalam melakukan penanganan pasien virus corona.

"Misalnya kalau mau pemantauan pasien harus diisolasi di rumah tidak boleh kemana-mana. Atau

pengawasan langsung kalau memang ada gejala-gejala demam atau tanda-tanda infeksi paru-paru serta ada riwayat kontak dengan orang yang diduga terinfeksi," jelasnya.

Diakui Adang, baik di Kabupaten Bandung maupun KBB masih ada RSUD yang masih minim fasilitasnya. Termasuk RSUD Lembang yang saat ini terkendala sarana dan prasarana maupun fasilitas medis lainnya.

"Kalau di RSUD Lembang ini memang ada kendala pada alat pelindung diri (APD). Mungkin di sini pasien tidak bisa lama. Tapi dengan kondisi tadi, cepat dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani Covid 19," papar anggota DPR RI dari Jabar II ini.

Manajemen Informasi COVID-19 Harus Ditingkatkan

Saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kesiapsiagaan Pemerintah dalam mengambil langkah. Termasuk, soal mitigasi penyebaran virus Corona. sampai saat ini korban virus Corona terus bertambah. Karena itu, Pemerintah perlu menyikapi ini secara serius.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil DKI II

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah Indonesia meningkatkan manajemen informasi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, hal ini tidak kalah penting, bagaimana Pemerintah bisa menenangkan masyarakat dalam menghadapi wabah virus Corona. Upaya komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan dengan baik.

"Bicara tentang COVID-19 yang paling utama saat ini

adalah meningkatkan kesiagaan dan juga kecepatan respon situasi terkini terkait perkembangan COVID-19," ungkap Kurniasih saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertema "Perluakah UU Khusus Atasi Dampak COVID-19" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Kurniasih mengatakan, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kesiapsiagaan Pemerintah dalam mengambil langkah. Termasuk, soal

mitigasi penyebaran virus Corona. Ia mengutarakan, sampai saat ini korban virus Corona terus bertambah. Karena itu, Pemerintah perlu menyikapi ini secara serius.

"Justru yang perlu ditingkatkan adalah langkah konkret dalam upaya mitigasi yang cepat. Protokol-protokol yang sudah dikeluarkan kemarin ada 5 protokol yang terbaru, itu harus dikawal pelaksanaannya," ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Ia menambahkan, Pemerintah juga dinilai perlu membuat suatu kesatuan kerja penanganan COVID-19 yang terdiri dari sejumlah kementerian terkait, agar bisa bersinergi semua lintas sektoral. Tugas Satgas juga nantinya diharapkan bisa memberikan informasi dan edukasi masyarakat agar tidak panik dengan corona sekaligus mengadakan kegiatan preventif. (ann/sf)



Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertema "Perluakah UU Khusus Atasi Dampak COVID-19" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Foto : Runi/Man



Level Pandemi, Mardani desak Bentuk Satgas Virus Covid-19

Pembentukan satgas agar penanganan covid-19 di Indonesia lebih terkoordinasi, terstruktur, terintegrasi dan jelas dibuatkan anggaran secara khusus. Pemerintah bisa belajar dari negara yang sudah lebih dulu membuat sistem penanggulangan Covid-19 secara komprehensif yang efektif seperti Korea Selatan, Singapura misalnya

Dr. H. MARDANI, M.Eng.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (13/03) — Legislator Fraksi PKS, Mardani Ali Sera desak Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan virus covid-19. Ia mengingatkan wabah virus sudah pada tingkat pandemik global.

"Pemerintah harus bentuk Satgas penanganan Virus Covid-19. Jangan terlambat dan mengentengkan situasi, apalagi WHO sudah menetapkan status pandemik global," kata Mardani, Jumat (13/03).

Lebih lanjut, inisiator #KamiOposisi ini mengatakan pembentukan satgas agar penanganan covid-19 di Indonesia lebih terkoordinasi, terstruktur, terintegrasi dan jelas dibuatkan anggaran secara khusus.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu peemerintah bisa belajar dari sejumlah negara yang berhasil menghadapi virus yang sudah menjangkit 130.000 jiwa dengan jumlah kematian hampir 5000 jiwa.

"Pemerintah bisa belajar dari negara yang sudah lebih dulu membuat sistem penanggulangan Covid-19 secara komprehensif yang efektif seperti Korea Selatan, Singapura misalnya," ujar Mardani.

Anggota Komisi II DPR itu juga berharap pemerintah bisa belajar dari penanganan virus H5N1 oleh pemerintahan sebelumnya, "jangan malu belajar dari keberhasilan pemerintah sebelumnya." Kata Mardani.

Menurut Mardani, Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan virus mematikan ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi, "Ketidakseriusan pemerintah bisa berakibat berbagai masalah yang akan timbul, termasuk krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat, antisipasi bisa dilakukan mulai dari pembagian masker gratis misalnya kepada warga," ujarnya

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi



yang masih sesuai protokol WHO dalam penanganan pandemik Covid-19. Ia juga minta pemerintah harus terbuka dan juga membuka data terkait daerah yang berisiko terhadap penyakit ini.

"Pemerintah bisa memulai melakukan strategi pemetaan, jangan cuma menunggu dari masyarakat tapi harus jemput bola dalam penanganan pandemik ini," kata Mardani.

Mardani mendesak Pemerintah berterus terang mengenai kondisi sebenarnya situasi pandemik ini di Indonesia.

"Pemerintah harus terus terang Masyarakat harus tau level corova virus yang sebenarnya terutama terkahir level virus Covid-19 Indonesia berada di level apa," pungkasnya.



Doa Untuk Kebaikan Negeri

اللهم ارفع عنا الفلاء والوباء

والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة
والشهداء والمجن ماضهم منها وما بطن من بلدنا
هذا (اندونيسيا) خاصة ومن بلدان المسلمين
عامة انك على كل شيء قدير...

Ya Allah, jauhkanlah kami dari melonjaknya harga-harga, wabah berbagai penyakit, perbuatan keji dan munkar, kerusuhan, berbagai kesulitan, dan berbagai ujian yang nampak maupun yang tersembunyi dari negeri kami Indonesia khususnya dan Negeri-Negeri kaum muslimin umumnya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



PKS Cari Kesamaan Pandang dengan SBY dan Demokrat Soal Kondisi Aktual Bangsa

Kita bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Cikeas (12/3) - Partai Keadilan Sejahtera melanjutkan safari kebangsaan ke sejumlah parpol. Malam ini PKS bertemu SBY dan Partai Demokrat di kediaman SBY Puri Cikeas. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden PKS Muhammad Sohlibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran DPP PKS. Sementara SBY didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhono, Syarif Hasan dan jajaran pimpinan Partai Demokrat.

Menurut Ketua Fraksi PKS

DPR Jazuli Juwaini pertemuan ini dalam rangka silaturahmi kebangsaan, bertukar pikiran tentang permasalahan aktual bangsa, pembelaan terhadap kepentingan rakyat kecil, dan bicara arah masa depan pembangunan bangsa ke depan.

"Pak SBY pernah memimpin bangsa ini dua periode yang gemilang dengan stabilitas ekonomi dan politik yang baik. PKS juga berada dalam kabinet SBY. Selain nostalgia, kita bahas kondisi aktual bangsa dari perspektif Pak SBY sebagai pemimpin dan negarawan yang

bersama Partai Demokrat pernah relatif sukses memimpin bangsa ini," ungkap Jazuli.

Banyak yang kita bahas, lanjut Jazuli, termasuk isu-isu aktual di parlemen seperti kasus Jiwasraya yang antara Fraksi PKS dan Demokrat bersepakat untuk mengajukan hak angket, juga soal omnibus law, BPJS Kesehatan, dan penanganan persebaran virus corona. SBY juga bicara tentang perlunya kita menghormati kedaulatan rakyat. Selain itu kita juga bicara seputar Pileg, Pilpres, dan Pilkada.

"Kita bersepakat kepentingan rakyat dan nasional harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan politik maupun legislasi. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan dan legislasi yang tidak cermat, tidak tepat, dan cenderung berdimensi jangka pendek dan pragmatis. Demikian juga dalam kontestasi pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada kita harus hormati betul kedaulatan rakyat," pungkas Jazuli.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat & Sukses

Atas terpilihnya

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
dalam dalam Kongres V Partai Demokrat 2020
di JCC Senayan, Jakarta,

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA (Kanan) bersama
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan
Demokrat dan PKS beberapa hari lalu di Cikeas.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

H. Sukamta, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

Pemerintah Harus Pimpin Rakyat Menghadapi Virus Corona

"Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi buktinya

Pemerintah Harus Pimpin Rakyat Menghadapi Virus Corona

Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi buktinya

H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Pothukam

Jakarta (13/03) — Pemerintah harus membuat persiapan dan memimpin rakyat Indonesia menghadapi masa puncak penyebaran wabah virus Corona. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta menanggapi perkembangan penanganan virus Corona di Indonesia.

"Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi

buktinya, "sebut wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini dalam pernyataan tertulisnya Jumat, (13/03/2020).

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia terus bertambah jumlah kasusnya setiap hari. Jika di China telah berlangsung beberapa bulan, di Indonesia saat ini merupakan fase awal penyebaran, terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncak pada rentang 60-80 hari kedepan sesuai dengan permodelan penyebaran virus Corona yang Pemerintah buat.

Terkait dengan kondisi ini Sukamta menekankan beberapa kebijakan yang tepat

harus diambil oleh pemerintah.

"Pertama, Presiden harus menyampaikan secara terbuka kepada rakyat apa langkah yang direncanakan dan akan diambil oleh pemerintah. Kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh rakyat untuk mendukung keberhasilan rencana tersebut. Langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada rakyat. Ujian kualitas kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi taruhannya," tegas anggota Komisi I DPR RI ini.

"Kedua, kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia bukan mengambil kebijakan yang aneh dan terkesan mengesampingkan manusia dibandingkan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia. Apalagi WHO telah mengaitkan penyebaran cepat virus Corona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara, salah satunya bisa jadi Indonesia. Rakyat memantau, merasakan dan mengambil kesimpulan dari informasi yang



beredar di masyarakat terkait dengan penanganan pemerintah," jelas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini

"Ketiga, pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat ketika fase puncak penyebaran mulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan hingga menyiapkan fasilitas. Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan

dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat elite," jelas Doktor alumni kampus negeri Ratu Elisabeth.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id.
Foto : dpr.go.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Habib Aboe Bakar Alhabsyi
Anggota Komisi III DPR RI

PKS : Berdasar UU Kesehatan, Harusnya Pemerintah Buka Data Sebaran Covid-19

Pembuatan sajian informasi Corona yang ditampilkan dalam web site pemerintah daerah DKI saya lihat sejalan dengan UU Kesehatan. Langkah tersebut menjalankan ketentuan pasal 155 UU Kesehatan, itu sudah tepat. Demikian pula langkah preventif dengan membatalkan e-formula, menutup tempat rekreasi dan membatalkan ijin keramaian adalah pola mitigasi yang cukup bagus." Ujar

PKS: Berdasar UU Kesehatan, Harusnya Pemerintah Buka Data Sebaran Covid-19

Pembuatan sajian informasi Corona yang ditampilkan dalam web site pemerintah daerah DKI saya lihat sejalan dengan UU Kesehatan. Langkah tersebut menjalankan ketentuan pasal 155 UU Kesehatan, itu sudah tepat. Demikian pula langkah preventif dengan membatalkan e-formula, menutup tempat rekreasi dan membatalkan ijin keramaian adalah pola mitigasi yang cukup bagus."

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Banjarmasin (14/3) Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al habsyi seharusnya pemerintah membuka data penyebaran Covid-19 kepada publik dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan.

"Pasal 154 UU Kesehatan mengatur bahwa Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan

persebaran penyakit yang berpotensi menular dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan." Disampaikan Aboe kepada media pada hari sabtu (14/3) di Banjarmasin.

Anggota Fraksi PKS ini memaparkan, Artinya pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi

pesebaran Covid-19 di Indonesia, karena Corona sudah menjadi wabah menular di dunia. Dimana saja lokasi yang menjadi sumber penularan harus disampaikan kepada masyarakat. Tentunya dengan sajian data yang baik akan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Sehingga penularannya dapat diantisipasi dan dicegah.

Dirinya juga secara khusus mengapresiasi langkah maju yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI, yang sejak awal sudah melakukan protokol kesehatan dan menerjunkan semua satuan kerja melalui instruksi Gubernur.

"Pembuatan sajian informasi Corona yang ditampilkan dalam web site pemerintah daerah DKI saya lihat sejalan dengan UU Kesehatan. Langkah tersebut menjalankan ketentuan pasal 155 UU Kesehatan, itu sudah tepat. Demikian pula langkah preventif dengan membatalkan e-formula, menutup tempat rekreasi dan membatalkan ijin



keramaian adalah pola mitigasi yang cukup bagus." Ujar Aboe.

Hal serupa yang sudah dilakukan oleh Pemda Solo juga patut di apresiasi. Aboe berharap pemerintah pusat dan daerah bisa saling sokong dalam menangani persoalan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kurangnya informasi mengenai Covid-19 dan penularannya akan berdampak buruk bagi masyarakat.

"Pagi ini, saya melihat banyak masyarakat

mengunjungi kolam renang untuk liburan akhir pekan. Jadi ada beberapa bus yang lewat di depan rumah saya di banjar baru, menuju kolam renang waterbom. Gak kayaknya jika satu orang saja yang sudah terkena Corona dan masuk ke kolam renang, tentunya akan cepat menyebar ke pengunjung lainnya. Hal seperti ini seharusnya diantisipasi dengan baik." Pungkas Aboe.

Foto : dpr.go.id

Penghapusan Religiusitas oleh Dewas KPK, Sebuah Kemunduran

Karena nilai religiusitas ini seharusnya menjiwai dari nilai-nilai dasar lainnya seperti keadilan, profesionalisme, sinergi, dan kepemimpinan. Nilai religiusitas merupakan panduan moral, yang sebenarnya sangat fundamental untuk pimpinan dan personel KPK,

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI,

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (10/03) — Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menyalahkan penghapusan religiusitas dari nilai dasar di KPK oleh Dewan Pengawas (dewas) KPK.

Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah langkah kemunduran.

"Karena nilai religiusitas ini seharusnya menjiwai dari nilai-nilai dasar lainnya seperti keadilan, profesionalisme, sinergi, dan kepemimpinan. Nilai religiusitas merupakan panduan moral, yang

sebenarnya sangat fundamental untuk pimpinan dan personel KPK," kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3).

Dia menjelaskan, alasan pimpinan KPK mengucapkan sumpah sesuai agamanya diatas kita suci sebelum menjalankan tugasnya lantaran hal tersebut merupakan ikatan moral yang merupakan bagian dari religiusitas. Hal serupa juga dilakukan terhadap semua penyidik maupun pejabat KPK sebelum menduduki jabatan

dan menjalankan tugasnya.

"Penghapusan nilai religiusitas ini tentunya akan juga membawa spekulasi di tengah masyarakat. Karena seolah ada upaya sekularisme, seperti ada langkah untuk menajaukan agama dari kehidupan bernegara," ujarnya.

Selain itu, dia khawatir, penghapusan religiusitas tersebut membuat publik akan melihat adanya upaya untuk mempreteksi nilai-nilai religiusitas dari berbagai instrumen berbangsa dan bernegara. Ketua Mahkamah Kehormatan DPR tersebut pun berharap, hal tersebut tidak terjadi.

"Saya rasa ini pertanda yang tidak baik untuk negara yang berdasarkan Pancasila. Karena penghapusan nilai religiusitas sama saja dengan menafikkan keberadaan sila pertama dalam Pancasila," tegasnya.

Sebelumnya Dewan Pengawas KPK telah merampungkan revisi kode etik untuk pimpinan KPK Filir Bahuri cs. Salah satu yang diubah



dalam revisi terbaru itu adalah digantikannya nilai religiusitas dengan sinergi dalam nilai dasar KPK.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, nilai religiusitas tersebut KPK cantumkan di dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK. Menurut KPK, religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai spritualitas yang diyakini

kebenarannya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

"KPK memandang religiusitas merupakan nilai tertinggi yang memayungi seluruh nilai dasar yang ada dalam kode etik saat ini meliputi integritas, keadilan profesionalisme, Kepemimpinan dan sinergi," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (9/3).

Motif Pemerintah Mengubah Pasal Mengenai Impor dalam RUU Omnibus Law

Mengapa kalimat berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional dihilangkan? Seolah Kementerian Pertanian hanya untuk hiasan saja tapi tidak serius difungsikan sesuai tujuannya

dr. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/03) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, menyoroti RUU Omnibus Law, dimana RUU tersebut dianggap tidak berpihak kepada para petani dalam negeri.

Slamet menyebut, diduga ada motif pemerintah yang cenderung pro terhadap aktivitas impor dengan mengubah beberapa pasal yang berkaitan dengan impor tersebut.

Slamet menuturkan, di UU nomor 19 tahun 2013 pasal 15 (1) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikatakan, Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,

diubah oleh RUU Omnibus Law Ciptaker, menjadi: Pasal 33 angka 1 (1), di mana Pemerintah pusat melakukan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri.

"Mengapa kalimat berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan Nasional dihilangkan? Seolah Kementerian Pertanian hanya untuk hiasan saja tapi tidak serius difungsikan sesuai tujuannya," ujar Slamet.

Tak hanya itu, lanjut Slamet, UU nomor 19 tahun 2013 pasal 15 (2) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga dikatakan, Kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam

negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri

"Hal itu kemudian diubah oleh RUU Omnibus Law Ciptaker, menjadi: Pasal 33 angka 1 (2), Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2), kata pengaturan impornya hilang, jelas terlihat motif memperbesar impor ketimbang ketimbang memprioritaskan produksi pertanian dalam negeri," jelas Slamet.

Slamet mengatakan, UU nomor 19 tahun 2013 pasal 30 (1) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berbunyi, Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.

"Aturan tersebut diubah oleh RUU Omnibus Law Ciptaker, menjadi: pasal 33



angka 2 (1), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor, jelas sekali lagi perubahan ini menunjukkan pemerintah berniat tetap akan melakukan impor meskipun sebenarnya stok produksi dalam negeri cukup" tambahnya.

Tak berhenti disana, di UU nomor 19 tahun 2013 pasal 30 (2) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan, Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh menteri Lalu, sambung Slamet, hal itu diubah oleh RUU Omnibus Law Ciptaker, menjadi: pasal 33 angka 2 (2), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selengkapnya Kunjungi
Fraksi.pks.id



Andi Akmal Permudah Nelayan Bone Terima Premi Asuransi

Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulawesi Selatan

Bone (12/03) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan sejumlah bantuan dan melakukan sosialisasi program prioritas perikanan tangkap untuk nelayan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bantuan yang diserahkan antara lain premi asuransi nelayan sebanyak 1.797 nelayan, 100 bidang penerbitan sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan bagi 150 nelayan.

Diiten Perikanan Tangkap juga memfasilitasi permodalan dari perbankan berupa

penyaluran kredit dari BRI senilai Rp 1,79 miliar, kredit senilai Rp 2,75 miliar dari BNI, dan kredit senilai Rp 3,99 miliar dari Bank Mandiri.

Anggota Komisi IV DPR, Andi akmal Pasluddin bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut ke sejumlah nelayan.

Akmal mengapresiasi pemerintah melalui KKP bahwa program prioritas bidang perikanan ini sejalan dengan amanat Presiden RI tentang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi

ekonomi.

Legislator Sulawesi Selatan II ini sepakat dengan Dirjen Perikanan Tangkap bahwa pertemuan seperti ini merupakan upaya untuk meningkatkan komunikasi dengan nelayan. Dialog dua arah dilakukan guna menyerap aspirasi nelayan.

"Selain memperkuat komunikasi juga kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh stakeholders perikanan tangkap untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengatakan akan terus mendorong dan melakukan pengawasan terhadap program pemerintah kepada nelayan agar semakin berkembang termasuk program asuransi untuk nelayan.

"Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap tidak hanya terjadi satu arah dari pemerintah saja melainkan juga dari para nelayan. Dengan adanya nelayan, kita bisa makan ikan yang kaya protein, menyehatkan sekaligus mencerdaskan," katanya.

Menurut politisi PKS ini, Kabupaten Bone terkenal



dengan potensi ikan cakalang, tongkol dan layang. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat.

"Karena Pemerintah daerahlah yang bersentuhan langsung dengan nelayan

setempat. Komunikasi dan Sinergi perlu terus dilakukan agar nelayan sejahtera.

Komitmen ini akan terus kita bangun dan tingkatkan untuk menjamin keberlanjutan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan", pungkasnya.

Hamid Noor Yasin: Penyaluran KUR Untuk Petani Kopi Perlu Diawasi

Program pertanian banyak gagal karena dilatari pelaksanaan rekomendasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalahgunaan bantuan yang dilakukan petugas penyalur dan petani juga masih banyak terjadi. Maksud rekomendasi tidak tepat sasaran, yaitu banyak petani yang tidak memiliki kedekatan dengan akses bantuan KUR. Akhirnya, mereka pun betul-betul tak tersentuh KUR, walau potensi pengembangan kopinya sangat besar.

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (14/03) — Rencana Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk para petani kopi perlu diawasi secara ketat. Mekanisme penyalurannya harus diperjelas, agar para petani kopi di daerah dapat dengan mudah mengakses bantuan KUR tersebut. Moral

hazard harus ditekan, seperti disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin, Kamis (12/03/2020).

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyalurkan KUR untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 3,96 triliun bagi petani kopi dengan bunga 6

persen tanpa agunan.

Penyaluran KUR ini didasari meningkatnya konsumsi kopi di dalam maupun luar negeri yang ditandai dengan merebaknya kedai-kedai kopi.

“Secara angka masih sangat normatif dan berbagai alasan bisa dibuat sebagai argumen. Namun, yang saya tekankan bagaimana mekanisme penyalurannya. Sejauh mana moral hazard dapat ditekan, baik pada tingkat petugas pembuat rekomendasi, petugas penyaluran, hingga petani atau kelompok tani penerima,” ungkap politisi PKS tersebut.

Menurut Hamid, program pertanian banyak gagal karena dilatari pelaksanaan rekomendasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalahgunaan bantuan yang dilakukan petugas penyalur dan petani juga masih banyak terjadi. Maksud rekomendasi tidak tepat sasaran, lajut Hamid, yaitu banyak petani yang tidak memiliki kedekatan



dengan akses bantuan KUR. Akhirnya, mereka pun betul-betul tak tersentuh KUR, walau potensi pengembangan kopinya sangat besar.

Persoalan krusial lainnya dalam penyaluran KUR adalah kebiasaan menjejat target sasaran dengan terburu-buru. Pada gilirannya, penyaluran dilakukan serampangan asal memenuhi target penyaluran KUR ini.

“Yang paling miris adalah terjadinya korupsi anggaran penyaluran, tapi ini jarang terjadi namun sangat memalukan,” kilahnya lebih

lanjut. Penyalahgunaan penyaluran bantuan KUR juga kerap terjadi yang justru dilakukan para petani sendiri.

Alokasi bantuan yang mestinya untuk pengembangan budidaya kopi, malah digunakan untuk keperluan lain. Disinilah Kementan harus mengawasinya dengan ketat.

Sementara Fakta lain penyimpangan KUR, papar legislator asal Wonogiri, Jawa Tengah ini, ketika dana KUR hanya dinikmati oleh ketua kelompok tani saja. Sementara anggotanya tak menikmati.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hj. Nevi Zuairina

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar 2

**Nevi Ajak Masyarakat
Sumbar Sambut Event
Nasional dengan
Produk UMKM**

Saya berharap, kita semua bisa bekerja sama, tidak melihat latarbelakang apapun partai politik nya. Agar pembangunan sumatera barat ini bisa merata tidak ada ketimpangan satu sama lain. Kemerataan dan kecilnya gini rasio antar daerah di Sumbar ini akan menjadi prestasi seluruh masyarakatnya



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@fkpsdprri



fraksi.pks.id

Reses DPR RI,

Nevi Zuairina Ajak Masyarakat Sumbar Sambut Event Nasional dengan Produk UMKM

Saya berharap, kita semua bisa bekerja sama, tidak melihat latarbelakang apapun partai politik nya. Agar pembangunan sumatera barat ini bisa merata tidak ada ketimpangan satu sama lain. Kemerataan dan kecilnya gini rasio antar daerah di Sumbar ini akan menjadi prestasi seluruh masyarakatnya

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumbar II

Padangpariaman (09/03) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina pada saat reses massa sidang II mengajak semua komunitas masyarakat Sumbar yang ia temui agar mempersiapkan diri menyambut berbagai event nasional yang akan di selenggarakan di Sumatera Barat dengan berbagai produk UMKM.

Nevi bertemu dengan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bertempat di kantor wali nagari sungai asam, kec 2x11 enam lingkung pada 8

maret 2020. Berbagai tokoh masyarakat pun turut hadir untuk bertemu ketua UMKM sumatera Barat ini untuk berdialog dan menyampaikan pendapat sebagai aspirasi warga.

"Sumbar akan mengadakan beberapa event nasional di tahun ini. Jangan sampai ada yang tidak berpartisipasi. Masyarakat harus meningkatkan kualitas dan kreativitas UMKM nya, agar bisa ikut dan memeriahkan setiap acara Nasional yang di adakan di Sumatera Barat. Dan

yang paling penting adalah kita dapat memperkenalkan kekhasan daerah kita, mulai dari produk hingga budaya kepada tamu-tamu yang datang kesni", pidato Nevi.

Selain itu, politisi PKS yang juga ketua PKK provinsi Sumatera barat ini juga menyerukan kepada para tokoh masyarakat, agar memiliki kemampuan membangun komunikasi kepada semua stakeholder yang ada. Stake holder yang ia maksud adalah, semua mitra yang ada baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

"Saya berharap, kita semua bisa bekerja sama, tidak melihat latarbelakang apapun partai politik nya. Agar pembangunan sumatera barat ini bisa merata tidak ada ketimpangan satu sama lain. Kemerataan dan kecilnya gini rasio antar daerah di Sumbar ini akan menjadi prestasi seluruh masyarakatnya", tutup Nevi Zuairina.



PKS terima Aspirasi Buruh Riau Bersatu terkait Omnibus Law

PKS selama ini selalu menjalin komunikasi intens dengan semua pihak termasuk serikat pekerja. DPP PKS beberapa minggu lalu melakukan Expert Group discussion yang dihadiri oleh Pakar dan Pimpinan Konfederasi SP/SB Nasional. Dari hasil EGD tersebut diungkapkan bahwa terdapat banyak permasalahan yang tidak pro terhadap kesejahteraan kaum buruh

Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt

Anggota Komisi VI DPR

Riau (13/03) — Anggota DPR RI Dapil Riau I, Chairul Anwar, menerima aspirasi Pimpinan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang tergabung dalam Buruh Riau Bersatu (BRB) Rabu, (04/03/2020) di Tualang.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan buruh yang diwakili oleh Sekertaris Buruh Riau Bersatu (BRB) Sunan Temenggung menyerahkan langsung pernyataan 3 sikap BRB yaitu menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja, Menuntut

untuk menurunkan luran BPJS Kesehatan dan meminta memulangkan TKA Unskill.

“Kami Tergabung dalam Buruh Riau Bersatu beranggotakan 20 organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Riau yang bertujuan untuk memberikan masukan dan penolakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kesejahteraan buruh,” ungkap Sunan.

Menanggapi hal tersebut Chairul Anwar mengungkapkan siap untuk mengawal dan

membawa aspirasi buruh riau untuk diperjuangkan di gedung parlemen.

“Kami siap membawa dan mengawal aspirasi teman-teman buruh Riau terkait omnibuslaw, Fraksi PKS sudah membuat tim untuk mengkaji dan memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang merugikan kesejahteraan buruh. PKS selama ini selalu menjalin komunikasi intens dengan semua pihak termasuk serikat pekerja. DPP PKS beberapa minggu lalu melakukan Expert Group discussion yang dihadiri oleh Pakar dan Pimpinan Konfederasi SP/SB Nasional. Dari hasil EGD tersebut diungkapkan bahwa terdapat banyak permasalahan yang tidak pro terhadap kesejahteraan kaum buruh,” jelas Politisi PKS asal Riau ini.

Hadir dalam pertemuan tersebut juga Serikat Pekerja Perjuangan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang dipimpin langsung oleh Ketuanya Zar'an Lubis, ST mengapresiasi sikap PKS selama ini terhadap Kaum Buruh.

“Kami SP Perjuangan PT. IKPP mempunyai anggota 2800 orang mengapresiasi sikap PKS



yang selama ini konsisten membela kaum Buruh, kami berharap juga sikap PKS sejalan dengan Buruh terutama terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” ungkap Zar'an.

Menanggapi hal itu Chairul memastikan bahwa sikap PKS akan selalu berpihak terhadap kesejahteraan buruh.

“Kami memastikan bahwa Insya Allah sikap PKS akan selalu berpihak terhadap

kesejahteraan buruh, Alhamdulillah PKS sudah memperlihatkan sikapnya selama ini dalam membela hak buruh,” tutup Chairul.

Amin Dorong Generasi Milenial untuk Berwirausaha

“Agar kita bisa memperoleh benefit yang maksimal dari bonus demografi, langkah yang harus kita lakukan adalah kita menjadi Wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bonus demografi harus diisi dengan kekuatan jumlah wirausaha

AMIN AK,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Jawa Timur IV

Jember (10/03) - Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak mendorong generasi milenial untuk menekuni dunia wirausaha.

Berani mengambil risiko dengan menjadi wirausahawan merupakan langkah tepat bagi pemuda yang ingin sukses. Hal itu disampaikan Amin saat bertemu dengan kalangan milenial di Jember, Jawa Timur dalam rangka kunjungan reses di daerah pemilihan, Selasa (10/3/2020) pagi ini.

Menurut Amin, kiprah kaum milenial saat ini akan menentukan wajah Indonesia ke depan, termasuk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, pada 2020, sekitar 83 juta atau 34 persen dari total penduduk Indonesia adalah milenial.

Namun Amin mengingatkan, BPS juga mencatat, proporsi anak-anak muda yang menganggur paling banyak lulusan SMA dan perguruan tinggi, masing-masing mencapai 17,4 persen dan 13,1 persen. Oleh karena itu, munculnya fenomena pengangguran terdidik di kalangan anak muda harus diantisipasi, salah satunya dengan memberikan wirausahawan baru.

“Agar kita bisa memperoleh benefit yang

maksimal dari bonus demografi, langkah yang harus kita lakukan adalah kita menjadi Wirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bonus demografi harus diisi dengan kekuatan jumlah wirausaha,” tegasnya.

Kalau tidak, Amin khawatir penduduk Indonesia nanti hanya menjadi pasar saja. Ia pun mendorong agar bisnis-bisnis rintisan saat ini bisa menjadi perusahaan besar di kemudian hari.

“Masa muda adalah masa yang fleksibel. Ketika gagal, kita masih punya cukup usia untuk kembali mencoba dan terus berusaha,” kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia dinilai masih sangat rendah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 1,65 persen dari jumlah penduduk. Rasio tersebut jauh tertinggal dibanding dengan jumlah pengusaha yang ada di negeri jiran seperti Singapura (7%), Malaysia (5%), maupun Thailand (3%)

Sementara negara-negara



maju seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki pengusaha lebih dari 10 persen dari jumlah populasi. Idealnya jumlah pengusaha adalah 2 persen dari total populasi, tetapi untuk mencapai target pendataan perkapita yang baik diperlukan 6,13 juta pengusaha atau sekitar 2,5 persen dari populasi. Saat ini jumlah wirausaha yang mapan sekitar 4 juta.

Oleh karena itu kaum milenial memiliki peran dan fungsi strategis dalam

mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Generasi muda saat ini memiliki karakteristik yang antusias, semangat kompetitif, serta kemampuan beradaptasi yang tinggi dengan perkembangan teknologi sehingga Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan bisa bersaing secara global.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

PKS: Jelang Ramadhan Stok Gas Harus Aman

Diperkirakan sebulan lagi kita memasuki bulan Ramadhan. Dalam waktu satu bulan ini sebaiknya Pemerintah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga persediaan stok gas. Biasanya saat Ramadhan permintaan gas melonjak

**Dr. H. MULYANTO,
M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (08/03) — Jelang bulan Ramadhan 1441 H anggota Komisi VII dari FPKS, Mulyanto minta Pemerintah melalui Pertamina menyiapkan persediaan gas untuk golongan rumah tangga. Selain persediaan yang memadai, Pertamina di minta memantau jalur distribusi agar tidak terjadi kelangkaan.

"Diperkirakan sebulan lagi kita memasuki bulan Ramadhan. Dalam waktu satu bulan ini sebaiknya Pemerintah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga persediaan stok gas. Biasanya saat Ramadhan permintaan gas melonjak," ujar Mulyanto saat kunjungan lapangan ke salah satu SPBE di wilayah Tangerang Selatan.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya tingkat konsumsi gas dan barang kebutuhan pokok biasanya meningkat di bulan Ramadhan. Kondisi seperti ini sangat mengoda spekulasi untuk memainkan persediaan barang agar terjadi kenaikan harga. Oleh sebab itu Pertamina harus membangun sistem pengawasan persediaan dan distribusi terpadu agar persediaan gas selalu terpenuhi.

"Kami mendorong Pertamina



na dapat bersinergi agar persediaan gas bagi masyarakat aman. Jangan sampai di bulan ibadah tersebut masyarakat diganggu dengan adanya kejadian kelangkaan gas," tegas Mulyanto.

Mulyanto menyarankan agar Pertamina menyiapkan rencana operasi pasar jika dalam kondisi tertentu terjadi kelangkaan gas di masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ulah spekulasi yang ingin mencari

untung berlebih di saat masyarakat membutuhkan barang secara bersamaan.

Mulyanto mengimbau agar Pertamina memaksimalkan fungsi agen, sub agen, pangkalan, SPBE dan SPBU di seluruh Indonesia untuk melayani penjualan gas kepada masyarakat secara langsung.

Selain itu Mulyanto mendorong Pertamina lebih aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kelangkaan gas, termasuk

mensosialisasikan keberadaan nomor pengaduan masyarakat 135. Dengan melibatkan masyarakat diharapkan kejadian kelangkaan gas di suatu daerah dapat segera di atasi.

"Jika jalur distribusi sudah terkoordinasi secara baik diperkirakan dapat memperkecil celah masyarakat termasuk spekulasi untuk memainkan harga jual gas," tandas Mulyanto.

Pembunuhan Anak 5 Tahun oleh Remaja, Bukhori: Peran Keluarga Sangat Utama!

Peristiwa yang terjadi di Sawah Besar menjadi preseden buruk untuk kesekian kalinya sehingga diperlukan langkah sistematis dari pelbagai pihak dalam mencegah peristiwa serupa, khususnya melalui pelibatan aktif peran keluarga”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jateng I

Jakarta (11/03) – UNICEF membagi jenis kekerasan pada anak sebanyak 5 jenis, yaitu kekerasan seksual, emosional, fisik, pengabaian, dan eksploitasi. Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah

mengalami kekerasan emosional. Lebih jauh, 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik.

Temuan tersebut tidak hanya menunjukkan anak dari sisi korban, tetapi juga dari sisi sebagai pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman sebaya. Hal tersebut bisa ditinjau dari persentase laporan pengaduan pelaku kekerasan dilakukan oleh teman sebaya yang berkisar di angka 47%-73%.

Kasus terbaru kekerasan

pada anak yang berujung pembunuhan bocah berusia 5 tahun oleh remaja berusia 15 tahun di Sawah Besar Jakarta Pusat kembali menambah catatan buruk bagi pencegahan kasus kekerasan pada anak di awal tahun 2020.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Ia menambahkan bahwa perilaku agresif anak juga turut dipengaruhi oleh realitas yang ada di sekitarnya sehingga peran keluarga menjadi sangat utama dalam membentuk kepribadian anak.

“Komisi VIII DPR RI sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mengambil bagian dalam upaya mendorong usaha optimal pemerintah dalam melindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan. Peristiwa



yang terjadi di Sawah Besar menjadi preseden buruk untuk kesekian kalinya sehingga diperlukan langkah sistematis dari pelbagai pihak dalam mencegah peristiwa serupa, khususnya melalui pelibatan aktif peran keluarga” ungkap Bukhori disela kegiatan reses di Semarang, Selasa (10/3/2020)

Menurut Bukhori, Fraksi PKS di DPR RI saat ini tengah menggodok RUU Ketahanan Keluarga dan sudah masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020. Tujuan dari RUU ini sebagaimana tercantum dalam pasal 4 salah satunya adalah mengoptimalkan fungsi keluarga dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak.

Ia menambahkan, RUU ini juga disusun sebagai respon atas banyaknya angka kegagalan keluarga yang terjadi di Indonesia. Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) pada 2019 mencatat, hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama telah memutus perceraian sebanyak 485.223 pasangan di seluruh Indonesia. Artinya, dalam kurun 1 tahun ada sekitar setengah juta keluarga yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga.

“Indikator kegagalan dalam keluarga tercermin dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak dari waktu ke waktu dan peningkatan angka perceraian pasangan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Resmikan Sekolah Tahfidz

Iskan: Pendidikan Agama Jadi Pondasi Ketahanan Keluarga

“Pendidikan agama sejak dini juga, dapat mengajarkan anak-anak kita untuk berakhlakul karimah, timbul rasa bergotong royong, dan semangat belajar yang tinggi. Saya bersyukur adanya sekolah seperti ini di kota kelahiran saya, jadi mari kita dukung dan antarkan anak-anak kita ke sekolah ini, agar mereka bisa lebih banyak berinteraksi dengan Alquran.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumut

Sibuhuan (14/03) — Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, berkesempatan dalam kunjungan reses dalam masa persidangan kedua ini untuk meresmikan sekolah “balitaku khatam Quran” di Sibuhuan, kabupaten padang lawas.

Acara tersebut terlihat dihadiri oleh ratusan para undangan yang terdiri dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan dari instansi pemerintah daerah. Dalam

rangka tasyakuran atas peresmian sekolah baru, Panitia mengadakan serangkaian acara bersama para undangan termasuk pembacaan hafalan Quran dari anak-anak yang berusia 3 - 5 tahun.

Dalam sambutannya, iskan menyampaikan bahwa pendidikan bagi anak usia dini itu sangat penting, “apalagi dengan program mendekatkan nya dengan Alqur’an, suatu kegiatan yang positif, yang harus layak kita dukung”

“pendidikan agama bagi anak menjadi pondasi utama tangguhny keluarga Indonesia. Harapan kita, ketika anak-anak ini memasuki masa emasnya, tahun 2045 nanti, mereka siap memegang amanah penting untuk mengambil peran dalam pembangunan karakter di negara kita” tegas iskan

“Pendidikan agama sejak dini juga, dapat mengajarkan anak-anak kita untuk berakhlakul karimah, timbul rasa bergotong royong, dan semangat belajar yang tinggi. Saya bersyukur adanya sekolah seperti ini di kota kelahiran saya, jadi mari kita dukung dan antarkan anak-anak kita ke sekolah ini, agar mereka bisa lebih banyak berinteraksi dengan Alquran.” Ujar iskan menambahkan

“tapi ini belum selesai, diharapkan juga kepada orang tua saat di rumah, dapat terus mendukung anak-anak kita agar semangat mendalami ilmu Al Quran. Masih sangat banyak yang harus dipelajari dan didalami, maka dari itu peran orang tua di rumah sangat penting, tidak ada salahnya



sama-sama belajar dengan anak-anak kita, untuk mendalami Ilmu Al Qur’an, insya Allah pemerintah akan terus mendukung untuk menjadikan Kabupaten palas menjadi kabupaten yang madani,” tutup iskan.

Reses bersama Pimpinan Majelis Taklim, Nur Azizah Ajak Luruskan Niat

Saya mengajak diri pribadi dan semua yang hadir untuk tetap menjaga niat agar tetap lurus karena Allah. Juga mengisi hati kita dengan mengingat Allah kapan pun dan di manapun

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Depok (09/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid, menggelar reses bersama para pimpinan Majelis Taklim di Kediaman Hj. Runayah & H Sueb, Serua Bojongsari Depok, Ahad, (08/03/2020)

Dalam sambutannya, Nur Azizah mengajak agar senantiasa meluruskan niat dalam segala hal, perbanyak dzikir & istighfar serta senantiasa berlimba dalam kebaikan.

“Saya mengajak diri pribadi dan semua yang hadir untuk tetap menjaga niat agar tetap lurus karena Allah. Juga mengisi hati kita dengan mengingat Allah kapan pun dan di manapun”, tuturnya.

Kepada yang hadir, Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyampaikan jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan

Aspirasi ke anggota atau FPKS DPR RI Hari Selasa merupakan Hari Khusus Aspirasi.

“Fraksi PKS mempersilahkan bagi siapa pun yang ingin menyampaikan masukan dan aspirasinya, dengan cara mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu agar dapat di sesuaikan jadwalnya oleh FPKS DPR”, pungkasnya.

Acara ini dihadiri juga oleh Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc, Pembina Majelis Al-Mubarakah Depok, Ustadz Sofyan Ketua DPRa Serua, Ustadz Teguh Ketua DPRa Bojongsari & Abdulloh Ketua RT 04/01 Serua.

Sementara diskusi dalam Reses saat ini mengangkat “Ketahanan Keluarga” tentunya sejalan dengan VISI Kota Depok yang telah ditetapkan sebagai “Kota Depok yang Unggul,

Nyaman dan Religius”.

Oleh karena itu, Nur Azizah juga meminta masyarakat untuk lebih berperan untuk mendidik dan membimbing seluas-luasnya masyarakat memahami agama dengan baik dan benar.

“mendidik dan membimbing keterampilan masyarakat berekonomi seperti yang dilakukan oleh Abu Tholib (Paman) kepada Rasulullah SAW masa kecil dan Remaja, serta mendidik dan membimbing masyarakat berawawasan luas agar tidak mudah tergoda oleh berbagai cobaan yang destruktif”, papar Nur Azizah.

Selanjutnya, Nur Azizah mengingatkan tentang peran ibu-ibu, apa pun aktivitas kita agar senantiasa patuh kepada kepala keluarga (suami), selama tidak dalam kemaksiatan, karena kepala keluarga merupakan penanggung jawab ketahanan keluarga.

“Menanggapi pertanyaan ibu Vivi bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar mau belajar Al-Quran sementara umumnya mereka hanya mau hadir seperti Yasinan & Taklim beliau menyarankan seperti arisan tingkat RW siap memfasilitasi & menghadirkan



ustadzah untuk mengajarkan Al-Quran tanpa biaya,” tandasnya.

Sementara, terkait usulan dari Bapak Endang, tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah beliau mengusulkan agar membuat surat agar kami ada landasan yang kuat untuk memperjuangkannya.

Dan yang terakhir beliau menghimbau & mengajak kita semua senantiasa ikut menjaga bumi agar tetap hijau, menjaga kelestarian lingkungan, dengan mencontohkan souvenir dari beliau, berupa kantong tempat minum (Tumbler) ramah lingkungan.

Reses di Bekasi, Nur Azizah Tekankan Pentingnya Ketahanan Keluarga

Saya sangat berharap dukungan lembaga, ormas dan kalangan luas dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi keluarga dalam pembangunan negara. peran para ibu sangat penting dalam menanamkan nilai akhlaq, aqidah, ibadah, sosial dan kemasyarakatan

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jawa Barat VI

Bekasi (13/03) — Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid dalam rangka reses mendatangi warga Jatiasih di Kantor MD Jatiasih Jl. Kav DPA No. 10 RT 01/12 Kp. Cakung Jatimekar Jatiasih Bekasi.

Acara tersebut dihadiri Ketua BPKK DPD PKS Bekasi li Marlina, Ketua DPC PKS Jatiasih Husin Marhusin Ketua RW 12, Bpk Arief Ketua RT 01/12 Jatimekar dan tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan Jati Asih kota Bekasi.

Tema besar dalam reses

kali ini adalah "Ketahanan Keluarga Sebagai Solusi Permasalahan Bangsa".

Pada kesempatan tersebut Nur Azizah menyampaikan urgensi RUU Ketahanan Keluarga serta perlunya dukungan lembaga.

"Saya sangat berharap dukungan lembaga, ormas dan kalangan luas dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi keluarga dalam pembangunan negara," tutur Nur Azizah.

Nur azizah Tamhid

mengingatkan para Ibu sebagai lembaga pendidikan utama bagi putra-putrinya.

"Para ibu sangat penting dalam menanamkan nilai akhlaq, aqidah, ibadah, sosial dan kemasyarakatan," pungkasnya.

Di akhie sambutan, Nur Azizah menyampaikan, apa pun peran dan aktifitas ibu-ibu semua di luar jangan lupa kewajibannya di rumah yaitu mengurus keluarga.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Bersama:

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

(Anggota Komisi IX DPR RI)

Tem

Mengoptimalkan

dalam Ke

puan

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

**Presiden Membentuk
Gugus Tugas Covid-19,
Netty Minta Agar Tim
Bekerja Progressif**

Petakan dengan jelas dan informasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Daerah yang menjadi entry point warga negara asing seperti Kuala Namu, Manado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus. Jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lock down sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih luas

Presiden Membentuk Gugus Tugas Covid-19

Netty Minta Agar Tim Bekerja Progressif

Petakan dengan jelas dan informasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Daerah yang menjadi entry point warga negara asing seperti Kuala Namu, Menado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus. Jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lock down sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih luas

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (15/03) — Netty Prasetyani, anggota Komisi IX DPR RI, menanggapi pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 oleh presiden sebagai langkah tepat, meski agak terlambat.

"Gugus tugas harus bekerja progressif, fokus, memiliki indikator kerja dan time line yang jelas. Harus langsung kerja ya, lakukan terobosan, dan jangan sampai terjebak pada

urusan administrasi atau birokrasi," katanya.

Menurut Netty, sejak awal dia sudah menggesa pemerintah melalui Kemenkes RI untuk tidak lamban dalam penanganan.

"Saya menilai terlambat. Implikasinya sudah kemana-mana. Kepanikan menyebar di masyarakat sampai pada panic buying akibat kurangnya informasi yang tepat. Rumor

dan hoax bertebaran. Bahkan muncul pemain masker yang mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan pribadi. Mengapa WHO sampai secara khusus menyurati Indonesia agar menerapkan darurat nasional," sesalnya.

Netty meminta transparansi dari pemerintah tentang daerah sebaran Covid-19 agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan antisipasi.

"Petakan dengan jelas dan informasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Daerah yang menjadi entry point warga negara asing seperti Kuala Namu, Menado, Bali, dan daerah lainnya, harus mendapat perhatian khusus. Jika diprediksi makin meningkat, kondisi ini dapat dijadikan dasar untuk dilakukan lock down sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih luas," tandasnya.

Netty meminta agar ada pembatasan mobilitas penduduk dari dan ke kota dengan pasien positif Covid-19.

"Tunda semua event yang melibatkan banyak orang.



Terapkan remote working dan sekolah off line," kata Netty.

Terkait penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP), Netty agak menyesalkan bahwa proses pengetesan specimen pada PDP masih harus dilakukan di Balitbangkes, Jakarta.

"Bagaimana keamanannya selama dibawa? Apakah Kemenkes tidak mampu menyiapkan laboratorium di setiap kota-kota besar?," tanya Netty.

Oleh karena itu, Netty berharap gerakan pencegahan tangkal Covid-19 harus melibatkan masyarakat secara masif.

"Manfaatkan waktu jelang

Ramadhan ini sebagai momentum untuk mengokohkan kesadaran hidup bersih dan sehat dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, gotong royong dan saling kasih sayang," ujar Netty.

"Tangkal Covid-19 dengan cara salam isyarat di dada, cuci tangan dengan air dan sabun, penyediaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, etika batuk dan bersin, serta penggunaan masker di tempat-tempat publik bagi yang sakit. Sebaiknya ini menjadi gerakan bersama semua elemen masyarakat," tutup Netty.

Aleg PKS Siap Fasilitas Alkes RSUD Soreang

“Secara keseluruhan, desainnya sudah sesuai dengan rumah sakit kelas internasional. Jadi saya tidak khawatir, tidak memalukan lah walaupun nanti digadang-gadang menjadi rumah sakit rujukan regional. Karena dari sisi persyaratannya cukup terpenuhi,

dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M.,Av.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jabar II

Bandung (12/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat meninjau progres pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/03/20).

Adang mengapresiasi inisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, dalam membangun sebuah rumah sakit yang cukup megah di pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Gading Tutuka Soreang.

“Secara keseluruhan, desainnya sudah sesuai dengan rumah sakit kelas internasional. Jadi saya tidak khawatir, tidak

memalukan lah walaupun nanti digadang-gadang menjadi rumah sakit rujukan regional. Karena dari sisi persyaratannya cukup terpenuhi,” tutur Politisi PKS ini.

Ia menyatakan siap membantu untuk memfasilitasi pengajuan kepada pemerintah pusat terkait pengadaan peralatan medis atau peralatan kesehatan (alkes).

“Kita coba cari anggaran, untuk bisa melengkapi peralatan medisnya,” ucapnya.

Dengan kapasitas 314 tempat tidur, kata Adang, RSUD Soreang cukup memenuhi syarat menjadi rumah sakit Tipe

A. Namun untuk menjadi rujukan di tingkat regional, perlu dilakukan penyesuaian dari kelengkapan fasilitas.

“Menurut Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) yang sekarang, dengan jumlah 314 tempat tidur, ini kurang lebih Tipe A. Dalam aturan Permenkes baru, untuk Tipe A tidak melihat dari kelengkapan fasilitas. Tapi permen-nya sendiri masih diolah, paling sedikit Tipe B. Yang jelas bukan C,” jelas Adang Sudrajat.



Mufida: Pemerintah Wajib Hentikan Kenaikan Iuran BPJS sesuai Keputusan MA

Saya menyambut positif keputusan MA ini. Maka, pemerintah wajib segera menindaklanjuti dengan menghentikan kenaikan iuran BPJS saat ini juga

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (10/03) — Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan pasal terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dengan keputusan ini, wajib menghentikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini juga.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menanggapi keputusan MA yang menyatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan MA ini bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) mengajukan judicial review ke MA dan meminta kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.

Sebagaimana diketahui, pasal yang dibatalkan itu berisi tentang besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya menyambut positif keputusan MA ini. Maka, pemerintah wajib segera menindaklanjuti dengan menghentikan kenaikan iuran BPJS saat ini juga," tegas Mufida.

Politisi Partai Keadilan

Sejahtera ini menambahkan, pemerintah harus belajar dari peristiwa ini. Jangan menambah beban hidup rakyat dalam situasi wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang melambat saat ini.

Menurut Mufida, setiap kali menemui masyarakat, termasuk di masa reses, banyak keluhan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

"Semua rakyat yang kami temui pada saat reses, menolak kenaikan iuran BPJS. Banyak peserta kelas 1 dan 2 pindah turun ke kelas di bawahnya karena merasa tidak sanggup lagi membayar," tutur Mufida.

Mufida melanjutkan, cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan pengelola BPJS juga banyak yang tidak tepat sasaran.

"Sejumlah warga miskin malah terhapus dari data PBI, sementara sejumlah warga mampu malah masuk," tambahny.



Menurut Mufida, di tengah merabaknya Covid-19 dan juga DBD, pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS.

"Bidang kesehatan Indonesia sedang menghadapi

ujian berat dengan adanya wabah Covid-19 dan meningkatnya pasien DBD. Karenanya harus lebih serius menangani dua penyakit tersebut sekaligus," pungkash Mufida.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

***DPR: Respon Pemerintah
Pusat Lambat, Seharusnya
Kegiatan Belajar dialihkan
ke Rumah***

Bagaimana dengan sekolah kita? Tindakan pencegahan yang rasional dan proporsional sangat diperlukan di lingkungan pendidikan, utamanya Sekolah dan Madrasah. Sambil terus melakukan edukasi yang efektif kepada siswa, apa sebenarnya yg sedang terjadi, mengapa dan harus bagaimana kita

DPR: Respon Pemerintah Pusat Lambat, Seharusnya Kegiatan Belajar dialihkan ke Rumah

Bagaimana dengan sekolah kita? Tindakan pencegahan yang rasional dan proporsional sangat diperlukan di lingkungan pendidikan, utamanya Sekolah dan Madrasah. Sambil terus melakukan edukasi yang efektif kepada siswa, apa sebenarnya yg sedang terjadi, mengapa dan harus bagaimana kita

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed.

Anggota Komisi X DPR RI dapil Jawa Barat V

Jakarta (14/3) Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta Pemerintah bertindak cepat dalam menangani Penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas. Terlebih Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menetapkan adanya pandemi global.

Di negeri kita, jumlah kasus terinfeksi semakin banyak, dari semula hanya 2 kemudian bertambah secara signifikan seperti deret ukur

4,6,19, 27,34 dan per kemarin 69 kasus. Sudah 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia." Disampaikan Fahmy Alaydroes dalam rilis pers kepada media hari Sabtu (14/3) di Jakarta.

WHO sudah pula menyuarakan Presiden Jokowi, pertama kekhawatiran dunia Indonesia akan mengalami pandemi covid-19. Sudah waktunya kita semua waspada, meski tetap tenang dan rasional.

Di berbagai negara, banyak aktivitas distop

sementara. Termasuk sekolah dan kampus.

"Bagaimana dengan sekolah kita? Tindakan pencegahan yang rasional dan proporsional sangat diperlukan di lingkungan pendidikan, utamanya Sekolah dan Madrasah. Sambil terus melakukan edukasi yang efektif kepada siswa, apa sebenarnya yg sedang terjadi, mengapa dan harus bagaimana kita." Tanya Fahmy.

Wabah Covid-19 ini sebaiknya juga dijadikan 'gebrakan' pendisiplinan seluruh warga sekolah, terutama guru dan siswa untuk membudayakan hidup bersih dan sehat, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah, dzikir dan doa.

"Segera aktifkan dan efektifkan protokol standar pencegahan Covid-19. Bila perlu pindahkan kegiatan belajar di rumah 2-4 pekan ke depan. Apa yang dilakukan oleh DKI dan Solo sudah benar, merespon dengan tepat dan cepat."

Terapkan kegiatan belajar-



mengajar dengan mengoptimalkan internet dan media digital. Buat program pembelajaran yang menarik dan interaktif berbasis project kepada siswa yang dapat dikerjakan sendiri atau berkelompok di rumah masing-masing. Networking.

Sumber belajar digital dan media sosial digital sangat bisa dimanfaatkan. Banyak hikmah yang dapat diambil, hadapi tantangan dengan cerdas dan rasional.

Foto : dpr.go.id

KKB dan Corona, PON Papua Butuh Jaminan Keamanan

Sudah banyak event olahraga besar di beberapa negara yang harus dibatalkan karena pertimbangan wabah Covid-19. “Pertimbangan antisipatif jadi lebih prioritas dibanding kerugian dana yang sudah disiapkan sejak jauh hari,

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Ketua Panitia Kerja (Panja) PON Komisi X DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran bagi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 (XX) di Papua pada oktober tahun ini, menyusul adanya dua musibah yang tengah melanda, yakni wabah virus Corona dan gangguan keamanan di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. “KKB dan Corona, dua hal berlainan jenis, tapi semuanya mematikan dan cukup mengkhawatirkan,” kata Fikri di Jakarta, Rabu (11/3).

Fikri, yang juga menjabat

Ketua Panitia Kerja (Panja) PON Komisi X DPR RI mengatakan, hambatan dalam pelaksanaan PON XX di Papua tidak hanya mencakup kendala infrastruktur ataupun hal teknis lainnya, namun justru dari isu keamanan dalam penyelenggaraan even berskala besar. “Kendala teknis pelan-pelan bisa diatasi, tapi ancaman terbesar justru soal wabah dan gangguan keamanan,” ujar dia.

Terkait Corona, meski virus yang bernama lain Covid-19 ini belum dilaporkan muncul di Papua, namun dikhawatirkan

bisa mewabah karena interaksi banyak orang dari seluruh Indonesia yang hadir dalam pekan olahraga tersebut. “PON XX ini diperkirakan akan dihadiri wakil dari 34 provinsi sebanyak 36 ribu orang atlet dan ofisial,” jelas Politisi PKS ini.

Politisi asal Tegal, Jawa Tengah ini juga menyoroti sudah banyak event olahraga besar di beberapa negara yang harus dibatalkan karena pertimbangan wabah Covid-19. “Pertimbangan antisipatif jadi lebih prioritas dibanding kerugian dana yang sudah disiapkan sejak jauh hari,” kata Fikri.

Namun demikian, Fikri berharap wabah Corona di tanah air segera mereda, menyusul berkurangnya aktifitas virus ini di negara asalnya, China. “Sehingga, pada waktunya PON nanti di Papua, wabah Corona sudah benar-benar hilang,” harap dia.

Kemudian, terkait aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan teror penembakan di distrik



Tembagapura beberapa hari terakhir, Fikri meminta jaminan keamanan dari pemerintah. “Meski yang disasar kelompok pengganggu adalah fasilitas Freeport, tapi cukup dekat dengan venue PON di Timika, ibukota kabupaten Mimika,” ucap Fikri.

Dia juga menyinggung aksi ini harus segera ditindak tegas, menyusul gelombang pengungsian dari beberapa desa di distrik Tembagapura tersebut. “Bukan hanya PON nanti yang kami khawatirkan, tetapi situasi aman dan kondusif bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” tegas Fikri.

PON XX Papua rencananya akan digelar pada 20 Oktober – 2 November tahun ini. Even olahraga terbesar di tanah air

ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 nomor disiplin di tiga klaster lokasi venue, yakni Mimika, Merauke, Kota dan Kabupaten Jayapura.

Venue di Kabupaten Merauke meliputi: Bermotor, Catur, Gulat, Sepak Bola Putri, wushu dan Anggar. Klaster di Kabupaten Mimika meliputi: Atletik, Bola Basket, Panjat Tebing, Biliard, Futsal, terbang layang, Aeromodelling, terjun payung, tarung derajat, serta bola tangan. Sedangkan Klaster di Kabupaten dan Kota Jayapura meliputi: Kriket, Hoky, Rakbi, Softball/Bisbol, menembak, gantole, paralayang, kempo, muaythai, senam, aquatic (renang, pola air, lancat indah), selam kolam, dan panahan.

Merdeka Belajar Langsung Diuji Terapkan

Keputusan meliburkan sekolah di beberapa wilayah ini perlu segera ditanggapi cepat oleh Kemendikbud dengan menyiapkan program pembelajaran jarak jauh yang bisa segera diaplikasikan pihak sekolah. Dengan kata lain, inilah uji terapan Konsep Merdeka Belajar secara nyata yang tengah diusung Mas Menteri Nadiem

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T |

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (14/03) --- Di tengah ramai kejadian wabah Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia Konsep Merdeka Belajar langsung mendapat uji terapan. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah mulai menerapkan pembatasan kegiatan publik termasuk meliburkan sekolah. Keputusan meliburkan sekolah ini diapresiasi anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah karena merupakan bentuk antisipasi dari potensi penyebaran covid-19 lebih luas

"Keputusan meliburkan sekolah di beberapa wilayah ini perlu segera ditanggapi cepat oleh Kemendikbud dengan menyiapkan program pembelajaran jarak jauh yang bisa segera diaplikasikan pihak sekolah. Dengan kata lain, inilah uji terapan Konsep Merdeka Belajar secara nyata yang tengah diusung Mas Menteri Nadiem," kata Ledia Hanifa

Pembatasan kegiatan publik dan meliburkan sekolah tentu tidak bermakna berhenti

dari aktivitas produktif. Namun tanpa kesiapan program dikhawatirkan banyak siswa yang terlena. Karena sekolah diliburkan kemudian malah asik main, nonton, jalan-jalan dan tidak melanjutkan aktivitas belajar dari rumah.

"Panduan umum perlu segera disebarkan oleh Kemdikbud melalui dinas untuk kemudian diaplikasikan secara lebih fleksibel oleh sekolah. Yang perlu dicanangkan adalah tujuan, sasaran hingga alokasi waktu dan jadwal pembelajaran dari rumah ini. Perlu dibuat rencana kegiatan, standar pencapaian serta limit waktu sehingga sekolah juga bisa mengolah rencana pembelajaran jarak jauh yang bisa diatur oleh siswa dan orangtua secara fleksibel namun terencana dan terukur," kata adeg Fraksi PKS ini pula

Tak lupa, kata Ledia lagi, perlu juga dibuat sosialisasi dan himbauan khusus dari pihak Kementerian Pendidikan pada orangtua untuk bersama mendukung program belajar jarak jauh sementara ini demi kesuksesan bersama.

"Pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk menjaga



kesehatan siswa, keluarga, masyarakat dan bangsa, tanpa mengurangi semangat menuntut ilmu. Jadi orangtua juga perlu dihimbau untuk mengawasi dan mendampingi anak didik dalam mengikuti program belajar jarak jauh ini.

Bukan misalnya malah diajak jalan-jalan, ke mall misalnya, di waktu yang biasanya merupakan waktu sekolah anak."



Serahkan Bantuan Beasiswa, Sakinah Dorong Ekonomi Kreatif

“Dan di sini, Desa Sakita, adalah salah satu termasuk destinasi wisata di Kabupaten Morowali. Makanya saya berharap, kedepannya ada banyak kegiatan terkait pengembangan ekonomi kreatif di tempat ini

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Morowali (11/03) — Dalam rangkaian perjalanan reses kali ini, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri, mengunjungi Kabupaten Morowali dan Tojo Unaua. Di Kabupaten Morowali, Sakinah yang duduk di komisi X tersebut, berkunjung dan mengadakan audiensi dengan warga di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (10/03/2020).

Saat bertatap muka, ada warga yang meminta bantuan untuk berdirinya Perpustakaan Desa. Ternyata, proposal terkait pembangunan Perpustakaan

Desa, telah dibuat Kepala Desa, sehingga proposal tersebut langsung diserahkan kepada Sakinah Aliufri.

Saat bertatap muka dengan warga, sebagai anggota Komisi X, yang salah satunya membidangi masalah pariwisata, Sakinah mendorong agar ekonomi kreatif dihidupkan serta dikembangkan di lingkungan wisata.

“Dan di sini, Desa Sakita. adalah salah satu termasuk destinasi wisata di Kabupaten Morowali. Makanya saya berharap, kedepannya ada banyak kegiatan terkait

pengembangan ekonomi kreatif di tempat ini,” ungkap Sakinah.

Ada banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang hadir. Beberapa aspirasi langsung dieksekusi oleh Sakinah. Diantaranya pengadaan buku iqro, Al-Quran, dan alat peraga TPA.

Selain itu, Sakinah memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa kepada salah satu warga yang berprestasi dari keluarga pra sejahtera untuk melanjutkan studi hingga ke jenjang strata dua (S2).



Hadir Pada Sarasehan DN-PIM,

Anis : PKS Yakin Pansus Bisa Bongkar Kasus Jiwasraya

Potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ditaksir mencapai sebesar 13,7 triliun, dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi milik negara itu sebesar 32,6 triliun. Kasus ini memang bukan kasus sederhana. Ia termasuk kejahatan yang terorganisir, yang melibatkan banyak aspek

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Jakarta (08/03) — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan bahwa potensi kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ditaksir mencapai sebesar 13,7 triliun, dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi milik negara itu sebesar 32,6 triliun.

"Kasus ini memang bukan kasus sederhana. Ia termasuk kejahatan yang terorganisir,

yang melibatkan banyak aspek," ungkapnya. Hal ini disampaikan Anis di Jakarta, Kamis, (05/03/2020) pada acara Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang diketuai Prof. Din Syamsuddin.

Legislator dari dapil Jakarta Timur ini juga mengungkapkan bahwa PKS bersama dengan Partai Demokrat telah mengusulkan pembentukan pansus kepada pimpinan DPR.

Namun, setelah dua kali sudah paripurna usulan tersebut tidak dibacakan pimpinan DPR RI.

Anis menjelaskan bahwa pembentukan pansus harus diusulkan lebih dari 1 fraksi dan diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR RI. "Keduanya sudah terpenuhi," tegasnya.

Dihadapan audiens yang berjumlah sekitar 150 orang ini, Anis menegaskan bahwa PKS meyakini kasus Jiwasraya dapat dituntaskan dengan pembentukan pansus bukan panja.

"Karena pansus memiliki kewenangan lintas komisi, lintas bidang, dapat melakukan audit investigasi, memanggil orang dan melibatkan penegak hukum. Sementara panja tidak memiliki kewenangan ini," imbuhnya.

Menanggapi pertanyaan salah satu peserta yang nampak tidak percaya terhadap keseriusan pemerintah dan DPR dalam menuntaskan kasus Jiwasraya, ia mendorong pergerakan ekstra parlemen agar turut



aktif menyuarakan kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasinya ke DPR.

"Ingat bahwa negara kita menganut sistem trias politika dimana kewenangan politik dibagi kepada tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Aspirasi masyarakat harus masuk melalui ketiga lembaga ini sesuai fungsinya," katanya menambahkan.

Menutup pembicaraannya,

Anis menekankan bahwa jika depan masyarakat harus lebih jeli memilih wakil rakyat agar benar-benar bisa menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik, akan menjadikan DPR sebagai lembaga wakil rakyat yang efektif dalam membela kepentingan rakyat," pungkasnya.

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan, Kabar Baik Bagi Perekonomian Rakyat

beberapa harga barang yang merangkak naik adalah cukai rokok, parkir, harga plastik, dan tarif ojek online. Kesemua itu menyebabkan daya beli menurun. Kehidupan rakyat semakin terjepit. Kami apresiasi keputusan MA

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (12/03) — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Keputusan tersebut setidaknya mengurangi tekanan yang dihadapi rakyat.

Dengan demikian, iuran BPJS menggunakan tarif lama yaitu: kelas 1 sebesar Rp80 ribu; kelas 2 sebesar Rp51 ribu; dan kelas 2 sebesar Rp25.500.

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Ecky Awal Mucharam menyambut baik keputusan MA tersebut, karena sejak awal Ecky tidak setuju kenaikan BPJS disaat ekonomi masih melambat.

"Ekonomi stagnan di angka 5 persen. Tetapi kenaikan barang, baik yang diatur pemerintah maupun melalui mekanisme pasar cukup tinggi", ungkap Ecky.

Awal tahun ini, Ecky menambahkan, beberapa harga barang yang merangkak naik adalah cukai rokok, parkir,

harga plastik, dan tarif ojek online.

"Kesemua itu menyebabkan daya beli menurun. Kehidupan rakyat semakin terjepit. Kami apresiasi keputusan MA," kata Ecky di sela-sela reses anggota DPR di dapilnya (11/03/2020).

Dampak kenaikan iuran BPJS terekam jelas pada perkembangan inflasi. Tahun 2019, inflasi kesehatan mencapai 3,46 persen; sedangkan pada Januari dan Februari meningkat menjadi



3,87 persen dan 3,99 persen.

"Batalnya kenaikan tarif BPJS sedikit banyak membantu keuangan rumah tangga masyarakat dan perusahaan," kata Ecky.

Anggota DPR RI Komisi XI ini memaparkan terkait pembatalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

"Pertama, perlu

memastikan bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran selama Januari-Februari," tuturnya.

Kedua, lanjut Ecky, langkah-langkah pemerintah menambal defisit BPJS ke depan, dan Ketiga, bagaimana agar program tersebut tetap berjalan.

Junaidi Auly Soroti Pentingnya Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Setiap lembaga jasa keuangan diharapkan jangan mementingkan pemasaran produknya saja, lembaga harus lebih berkontribusi terhadap literasi dan perlindungan konsumen dalam hal data pribadi

Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Lampung

Lampung (11/03) — Penerapan teknologi dalam industri jasa keuangan telah memudahkan masyarakat atau nasabahnya dalam melakukan transaksi. Bahkan untuk dalam menyerot dan meminjam uang, masyarakat tidak perlu ke bank yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dibalik kemudahan itu ada risiko yang harus diketahui, salah satunya yaitu terkait data pribadi.

Junaidi Auly, selaku Anggota Komisi XI DPR menilai perlindungan data pribadi

konsumen merupakan hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah di era digital sekarang ini. Menurutnya, literasi konsumen pada sektor jasa keuangan dan peran OJK sebagai pengawas operator jasa keuangan perlu ditingkatkan lagi.

"Setiap lembaga jasa keuangan diharapkan jangan mementingkan pemasaran produknya saja, lembaga harus lebih berkontribusi terhadap literasi dan perlindungan konsumen dalam hal data pribadi," ujar Junaidi dalam

agenda Penyuluhan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dengan OJK Lampung di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Selasa, (10/3/2020).

Data Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, pada 2019 terdapat 1.871 pengaduan konsumen. Sektor jasa keuangan yang paling mendominasi yaitu 46,9 persen, dengan rincian sektor perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, dan leasing 32 kasus.

"Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa sektor jasa keuangan mendominasi pengaduan, diharapkan kedepan lembaga jasa keuangan benar-benar memperbaiki jasa layanannya kepada konsumen. Tidak sekedar retorika semata, tapi ada tindakan nyata dan sesuai" kata Junaidi.

Legislator dari dapil Lampung II ini mengatakan



Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan jaminan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

"Namun disayangkan UU tersebut belum mengatur perlindungan data pribadi konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih dalam proses," tutup Politisi Fraksi PKS ini.

Hadapai Era 4.0, Nevi Zuairina Resmikan Komunitas Rajut Pasaman Barat

Saya berharap, dengan adanya komunitas rajut di Pasaman Barat ini, akan membangun sebuah cita-cita bersama untuk kemajuan daerah. Sehingga, bila seluruh pihak memiliki sikap dalam visi dan misi yang sama, maka akan terjadi akselerasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Sumbar II

Pasaman Barat (12/03) — Legislator asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina melakukan peresmian "Komunitas Rajut Ummi Sholeha" yang dilakukan di dapilnya Kaplingan Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman pada 10 Maret 2020.

Ia menekankan bahwa point besar untuk dapat beradaptasi pada era saat ini adalah berpartisipasi pada pengembangan dalam menghadapi era industri 4.0.

Peresmian komunitas rajut yang dilakukan anggota DPR komisi IV ini, turut dihadiri oleh beberapa pejabat kabupaten

Pasaman barat. Sinergitas dan kerjasama yang baik untuk mendukung kegiatan positif masyarakat ini mendapat apresiasi seluruh pihak termasuk masyarakat pelaku industri kecil menengah di daerah Pasaman Barat.

"Saya berharap, dengan adanya komunitas rajut di Pasaman Barat ini, akan membangun sebuah cita-cita bersama untuk kemajuan daerah. Sehingga, bila seluruh pihak memiliki sikap dalam visi dan misi yang sama, maka akan terjadi akselerasi dalam pembangunan dan meningkatkan taraf hidup

masyarakat", ujar Nevi.

Politisi PKS yang kerap disapa dengan Bundo Nevi ini menekankan bahwa seluruh masyarakat terutama pelaku usaha, harus menyerap dan mengaplikasikan kemajuan teknologi yang berdampak luas terhadap kehidupan kita. Sehingga, ada kondisi yang membuat kita semua mampu untuk dapat beradaptasi dan berkolaborasi dengan teknologi tersebut.

Bundo Nevi menyampaikan, bahwa Komunitas perlu memberi dampak positif kepada pembinaan dan pengembangan masyarakat untuk menjadi lebih produktif. Ketika pembinaan dan pengembangan sudah berlangsung secara intensif di masyarakat, maka kedepan, komunitas seperti komunitas rajut ini akan menjadi banyak karena cenderung memiliki kegiatan yang sangat positif.

Anggota DPR yang juga Ketua Forum UMKM Sumbar ini menghimbau pada seluruh anggota Komunitas untuk dapat memaksimalkan semua potensi yang ada. Yang ia maksud potensi-potensi itu antara lain seperti akses bantuan modal



dan jaringan pemasaran. Oleh sebab itu, komunitas rajut harus terus dikembangkan dan mulai meluaskan dampaknya kepada masyarakat Pasaman pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Komunitas produktif yang muncul di tiap-tiap daerah Sumatera Barat, perlu mempersiapkan diri baik secara

sistem maupun pola organisasinya. Persiapan yang perlu diperhitungkan salah satunya adalah pengembangan komunitas berbasis teknologi. Selain itu, dalam pengelolaan komunitas, pastikan memenuhi semua syarat agar dapat terbangun sinergitas dengan pihak lainnya, seperti pemerintah dan NGO lainnya", jelas Nevi

Reses ke Pesantren, Syaikhu Sampaikan RUU Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan pondasi sebuah bangsa. Jika ingin bangsa dan negara maju dan beradab, maka keluarga harus dibenahi dengan baik. Maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh keluarga.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil Jawa Barat VII

Purwakarta (14/03) — Anggota DPR Ahmad Syaikhu menyampaikan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Hal itu disampaikan Syaikhu saat reses di Pesantren Babussalam, Tegal Waru, Purwakarta, Jum'at (13/03/2020).

Menurut Syaikhu, keluarga merupakan pondasi sebuah bangsa. Jika ingin bangsa dan negara maju dan beradab, maka keluarga harus dibenahi dengan baik.

"Maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh keluarga. Karena itu, keluarga

merupakan pondasi yang harus jadi perhatian dan dibenahi dengan baik," ujar Syaikhu dihadapan Kyai, santri, aparat pemerintahan setempat dan tokoh masyarakat Tegal Waru, Plered, Purwakarta.

Syaikhu melanjutkan, RUU Ketahanan Keluarga disusun dalam bingkai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara berkeluarga dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1).

Jika dicermati secara keseluruhan, kata Syaikhu,

pasal demi pasal dalam RUU ini adalah upaya perlindungan dan dukungan bagi keluarga-keluarga Indonesia.

"RUU ini untuk membentuk keluarga yang dapat berkembang menjadi keluarga tangguh secara mandiri," pungkas Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu.

Hadir dalam reses tersebut antara lain pimpinan pesantren Ustadz Asep Nuryani, aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat serta para santri.



Gempa di Sukabumi, Slamet serahkan bantuan pada korban gempa

Kalau pemerintah sudah menghimbau dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa aman. Saya akan melihat kondisi lapangan, nanti akan saya sampaikan agar ada bantuan terkhusus di dapil saya

drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Sukabumi (12/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh Slamet memberikan bantuan sembako kepada warga Kampung Babakan RT09/04 Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/3/2020).

Slamet mengatakan, bantuan tersebut diberikan langsung kepada korban lantaran ia mendengar belum ada penanganan oleh pemerintah daerah di kawasan tersebut.

"Saya mendengar ada bencana di wilayah di Kalapanunggal dan Kabandungan, ingin melihat

langsung kondisi di lapangan. Mereka mengeluhkan belum ada penanganan dari pemerintah setempat karena semuanya terpusat di posko," ujarnya kepada wartawan di lokasi.

Slamet meminta kepada BPBD turun langsung ke setiap kedesunan untuk mendata korban-korban yang terdampak. Hingga saat ini korban di kampung ini enggan meninggalkan rumahnya lantaran khawatir kehilangan harta bendanya.

"Standarnya warga di kampung ini harus segera mengungsi karena kondisi

kemiringan tanahnya. Cukup khawatir warga di permukiman ini," tuturnya.

Slamet menuturkan, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersedia mengungsi dengan menjanjikan keamanan di kampungnya kepada masyarakat.

"Kalau pemerintah sudah menghimbau dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa aman. Saya akan melihat kondisi lapangan, nanti akan saya sampaikan agar ada bantuan terkhusus di dapil saya," paparnya

Saat ini, masih kata Slamet, bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat hanya baru berupa sembako. Slamet menjelaskan jika situasi sudah terpantau aman nantinya bantuan bahan bangunan untuk renovasi.

"Khawatir ada gempa susulan, nanti baru bahan bangunan. Nanti kami akan membuka posko pengungsian di wilayah kampung ini dan di Kalapanunggal," tandasnya



Dimiyati : Guru Ngaji Jadi Garda Terdepan Keutuhan NKRI, Perjuangkan Nasib Guru Ngaji

kesejahteraan para guru ngaji harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini akan saya perjuangkan agar pemerintah khususnya memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji.”

**Dr. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH,
S.H.,M.H**

Anggota Fraksi PKS DPR RI
dapil Banten I

Anggota komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. H A Dimiyati Natakusumah, SH, MH asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I yaitu Kabupaten Lebak-Pandeglang mengajak dan berharap kepada para guru ngaji untuk tetap menjaga persatuan dan kekompakan terutama dalam menjaga

keutuhan NKRI di daerah.

“Saya berharap para guru ngaji yang sebagian besar para ustadz, kiyai dan ulama di Banten khususnya Banten I bisa menjadi garda terdepan menjaga persatuan umat dan keutuhan NKRI.” tandas Dimiyati ditengah-tengah masyarakat khususnya para guru ngaji pada kegiatan reses dan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Kecamatan Sindangresmi, Senin (09/3/2020).

Menurut Dimiyati, selama kegiatan masa reses sebagai anggota DPR RI ke daerah asal pemilihannya ini, selain merupakan momen penting untuk memberikan sosialisasi pemahaman 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah yang dilakukannya (Dimiyati,-red) silaturahmi dan menyerap berbagai aspirasi dari konstituen di Dapil Banten I tersebut.

“Yah benar, kegiatan masa reses ini saya manfaatkan untuk silaturahmi dengan seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Bagaimana saya melihat persatuan dan kesatuan tetap



terjaga, terpelihara dengan baik. Terutama sikap gotong-rojong dan saling membantu di masyarakat tetap dipupuk atau tertanam di masyarakat. Sehingga situasi aman dan kondusif tetap dipertahankan agar keberlangsungan pembangunan bisa berjalan sesuai harapan rakyat.” beber

Dimiyati, seraya menambahkan bahwa keberadaan para guru ngaji di berbagai pelosok daerah sangat memiliki pengaruh untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama terhadap pendidikan ahlah yang baik.

“Untuk itu, kesejahteraan

para guru ngaji harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini akan saya perjuangkan agar pemerintah khususnya memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji.” pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



RESES
Masa Sidang II Tahun
H. NURHASAN ZAIDI

H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar IX

Kunjungi Masyarakat Pasca Banjir Subang, Nurhasan Zaidi Serahkan Bantuan

Kita sangat prihatin dengan musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, di masa reses ini kita ingin melihat kembali kondisi masyarakat dan pastikan mereka kembali semangat

Kunjungi Warga Pasca Banjir Subang, Nurhasan Zaidi Serahkan Bantuan

Kita sangat prihatin dengan musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, di masa reses ini kita ingin melihat kembali kondisi masyarakat dan pastikan mereka kembali semangat

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan Subang, Majalengka

Subang (11/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, H.Nurhasan Zaidi, mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat, Selasa (10/13/20).

"Kita sangat prihatin dengan musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, di masa reses ini kita ingin melihat kembali kondisi masyarakat dan pastikan mereka kembali semangat", ungkap Nurhasan.

Dalam kunjungannya, Anggota DPR dari daerah pemilihan Subang, Majalengka

ini menyerahkan paket sembako dari kemensos dan bantuan renovasi rumah (BSPS) dari kementerian PUPR untuk masyarakat.

"Berharap dapat meringankan beban masyarakat, semoga mereka beresahan dgn musibah yang terjadi dan Allah mengganti dengan yang lebih baik," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang juga di hadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Subang tersebut, Nurhasan menyampaikan bahwa saat ini verifikasi dan validasi data

masyarakat miskin, sebagai data primer untuk pemberian bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan, sedang dilakukan.

"Dengan verivali data kemiskinan, kita ingin memastikan bahwa data tersebut tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat subang dan lainnya yg masuk dalam kategori, tapi tidak masuk dalam data, termasuk kemiskinan akibat bencana. Kita akan kawal terus, karena saya juga anggota Panjanya, mohon do'anya", pungkas Nurhasan.



HNW: Kami Komitmen Bela Guru PAUD di Revisi UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen

“Kami sudah mendorong Revisi dua UU tersebut, dan alhamdulillah sudah bisa diterima ke dalam Prolegnas long list (2019-2024). Perlu dukungan Himpaudi juga, melalui loby mereka ke Fraksi-fraksi yg lain di DPR, agar bisa masuk ke Prolegnas Prioritas tahun depan”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil DKI Jakarta II

Jakarta, (10/03) — Anggota DPR-RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menekankan bahwa Pihaknya tegas memperjuangkan aspirasi guru PAUD dalam Revisi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan Revisi UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

“Kami sudah mendorong Revisi dua UU tersebut, dan alhamdulillah sudah bisa diterima ke dalam Prolegnas long list (2019-2024). Perlu dukungan Himpaudi juga, melalui loby mereka ke Fraksi-fraksi yg lain di DPR, agar bisa masuk ke Prolegnas Prioritas tahun depan”, ujar Hidayat di

depan Pengurus Himpaudi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Jakarta di DPR (10/03).

Hidayat menyampaikan bahwa salah satu aspirasi yang kerap disampaikan oleh Himpaudi adalah agar pendidik/guru PAUD non formal dapat diakui sebagai guru secara hukum, sehingga dapat memperoleh hak-hak guru sebagaimana mestinya. Namun, aspirasi tersebut terganjal dengan aturan yang berlaku saat ini yakni UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, di mana kedua UU tersebut tidak mengakui pendidik PAUD non

formal sebagai guru.

Ia memastikan PKS akan terus konsisten mendukung aspirasi guru2 Paud tersebut, namun tidak cukup jika hanya didorong oleh satu partai. Oleh karena itu ia meminta agar Himpaudi melakukan safari ke setiap fraksi yang ada di DPR agar proses Revisi dua UU tersebut berjalan lebih lancar dan sesuai dengan aspirasi bersama.

“Kita harus membela hak-hak para Guru PAUD karena mereka bagian penting yang membentuk generasi bangsa kita”, tegasnya.

Dalam pertemuan dengan Himpaudi tersebut, para pengurus menyampaikan beberapa aspirasi. Di antara aspirasi tersebut adalah keberatan Himpaudi atas pendirian PAUD negeri yang berdekatan dengan PAUD swasta dan insentif APBN untuk guru PAUD yang sudah tidak diberikan lagi sejak dua tahun terakhir.



Reses di Padang, Hermanto Perbaiki Warung Pedagang Lontong

Lontong merupakan produk turunan beras yang menjadi pangan khas di Sumatera Barat. Produk ini terbukti mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah" Mereka yang mengelola usaha mikro lontong perlu diberi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)",

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sumbar I

Padang (13/03) — Anggota DPR dari Dapil Sumbar 1 mengisi masa reses antara lain dengan kegiatan Renovasi Lapau pedagang lontong sayur di Simpang Tiga ByPass-Koto Pulai, Kota Padang. Kegiatan ini direncanakan dilakukan secara rutin bagi pedagang kecil setiap reses.

"Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi pedagang kecil penerima program", ucap Hermanto.

Lebih jauh dijelaskan, lontong merupakan produk turunan beras yang menjadi pangan khas di Sumatera Barat.

"Produk ini terbukti

mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah", tutur legislator dari FPKS ini.

"Mereka yang mengelola usaha mikro lontong perlu diberi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)", tandas Hermanto.

Reniwati, pemilik lapau, mengucapkan terima kasih atas renovasi tersebut. "Semoga Pak Hermanto sehat selalu. Semoga panjang umur", tuturnya.

Sebelum kegiatan renovasi lapau, Hermanto mengisi masa reses dengan menerima aspirasi perwakilan Tenaga

Pendamping Pengembangan Usaha Peternakan (TP2UP) Sumatera Barat di Padang Pariaman serta berkunjung ke Kabupaten Solok Selatan menemui kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Karya Nyata dan kelompok tani (Poktan) Sida Dadi.

Pertemuan dengan TP2UP Sumatera Barat dilakukan di Kedai Ampera Uniang, Katapiang, Batang Anai, Padang Pariaman. Mereka meminta diperjuangkan nasibnya agar sama dengan penyuluh lainnya diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus (P3K).

Terkait hal ini mereka minta dibantu agar Komisi 4 DPR mengagendakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan TP2UP Nasional pada akhir Maret atau setidaknya April 2020.

Pokdakan Karya Nyata dikunjungi di Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kec. Pauh Duo, Kab. Solok Selatan.

Pokdakan Karya Nyata adalah penerima dan pelaksana program Bioflok 2019, bantuan dari Kementerian Kelautan dan



Perikanan. Dalam peninjauan tersebut, kelompok dinilai belum mampu mengatasi kematian ikan. Perlu ada bimbingan teknis agar kelompok bisa mengatasi kematian ikan dan berhasil mengelola program sesuai harapan.

Poktan Sida Dadi dikunjungi di Jorong Sungai Lambai, Lubug Gadang Selatan, Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Poktan ini menyampaikan aspirasi agar bisa menerima program unit pengolahan pupuk organik (UPPO) 2020.

Anggota Komisi I DPR RI Siap Fasilitas Aspirasi Guru Honorar Non Kategori 35+

“Saat ini saya diamanahkan oleh FPKS untuk berada di Komisi I, namun demikian kami menerima aspirasi ini dan akan menyampaikannya pada rekan-rekan Anggota FPKS yang berada di Komisi X dan Komisi II yang bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar XI

Tasikmalaya (11/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menerima kunjungan perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorar Non-Kategori 35 Tahun Ke Atas (GTKHKN 35+) di rumahnya di Desa Ciawi, Kec. Ciawi Tasikmalaya Pada hari minggu (08/03/2020)

“Saya sangat bahagia dikunjungi oleh para Guru dan

Tenaga pendidik yang merupakan rekan kerja saat saya menjadi anggota komisi X pada periode lalu” sambut Toriq.

Kehadiran Bapak dan Ibu Guru tambah Toriq, yakni untuk menyampaikan aspirasi berupa hasil Rapat Koordinasi Nasional GTKHKN 35+.

Keinginan para guru honorar non-kategori yang

berusia di atas 35 tahun, untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes belum padam. Untuk memperlihatkan keseriusan tersebut, mereka bahkan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kemayoran, Jakarta, pada 20 Februari 2020 lalu.

“Menurut perwakilan organisasi GTKHKN 35+ Tasikmalaya, Rakornas itu diadakan untuk menyusun laporan sebagai informasi bagi pemerintah terkait keberadaan mereka yang berjumlah sekitar 254 ribu orang di seluruh Indonesia”, jelas Toriq.

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus bagi guru dan tenaga kependidikan honorar non-kategori umur 35 tahun ke atas. Dalam Rakornas tersebut mengusung satu tujuan, yakni mendesak pemerintah segera menerbitkan surat Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat mereka jadi PNS tanpa tes.

Selanjutnya dari



pertemuan ini, perwakilan GTKHKN 35+ berharap kepada Toriq Hidayat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

“Saat ini saya diamanahkan oleh FPKS untuk berada di Komisi I, namun demikian kami menerima aspirasi ini dan akan menyampaikannya pada rekan-rekan Anggota FPKS yang

berada di Komisi X dan Komisi II yang bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)”, ujar Toriq.

“Semoga perjuangan para GTKHKN 35+ dapat memberikan hasil yang terbaik” , tutup Toriq.

Wabup Inhil Curhat ke Syahrul Aidi, Keluhkan Kondisi Infrastruktur

Semua aspirasi yang disampaikan oleh Pemkab dan Kades di Inhil tersebut akan kami perjuangkan di Komisi V. Jika ada aspirasi tersebut kewenangannya tidak di Komisi V, maka akan saya komunikasikan dengan Anggota Fraksi PKS di Komisi Lain

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau

Tembilahan (14/03) — Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maaizat terus melaksanakan agenda roadshow seluruh kabupaten yang tergabung dalam Dapil Riau 2. Hal itu dalam rangka melaksanakan agenda reses masa sidang kedua tahun 2020.

Usai sehari sebelumnya keliling di Kabupaten Inhu, maka pada Jumat dan Sabtu (13-14/03/2020) beliau melaksanakan agenda reses di Kabupaten Inhil.

Usai melaksanakan konsolidasi dengan kader PKS pada Jumat pagi, Syahrul Aidi

memenuhi undangan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Pemkab Inhil yang dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil Syamsudin Uti beserta Kepala OPD Pemkab Inhil.

Syamsudin Uti pada kesempatan itu langsung 'curhat' tentang kondisi Inhil saat ini. Inhil, menurut Syamsudin Uti sering dipersepsikan sangat jauh dari wilayah maju seperti Pekanbaru atau Batam. Maka banyak investor yang ragu untuk berinvestasi di Inhil.

"Dulu zaman Rusli Zainal (eks Gubri), kita punya Bandara

dan Pelabuhan. Namun saat ini hanya Susi Air yang masuk, karena lapangan udara kita kurang panjang. Maka kita berharap pak Syahrul Aidi untuk mengkomunikasikan ke kementerian terkait" terang Syamsudin Uti.

Selain bandara dan pelabuhan, Syamsudin Uti juga berharap agar Syahrul Aidi juga memperjuangkan jalan nasional yang ada di Kabupaten Inhil.

Usai pertemuan dengan Wabup dan Kepala OPD Pemkab Inhil, pada Jumat sorenya Syahrul Aidi juga menerima undangan dari perwakilan Kepala Desa se-Inhil. Mereka meminta bantuan Syahrul Aidi untuk memperjuangkan beberapa aspirasi mereka di Kementerian Desa dan PDT.

Syahrul Aidi saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/3/2020) pagi menyampaikan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh Pemkab dan Kades di Inhil tersebut akan beliau perjuangkan di Komisi V.



"Jika ada aspirasi tersebut kewenangannya tidak di Komisi V, maka akan saya komunikasikan dengan Anggota Fraksi PKS di Komisi Lainnya." tambahnya.

Sementara itu menyikapi soal Bandara Tempuling, Syahrul Aidi akan mencoba

mengkomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk mencari langkah terbaik untuk membesarkan kembali bandara tersebut.

Aleg PKS Menyapa Warga Jatinegara yang Menjadi Korban Banjir

Banjir ini adalah ujian yang Allah SWT berikan, dan pahala bagi orang-orang beriman yang bersabar. Saya mengajak bapak dan ibu warga Jakarta untuk terus berbaik sangka dengan berpikiran baik, untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI dapil DKI Jakarta I

Jakarta (10/03) — Gang-gang di jalan Lengkong Bidara Cina masih menyisakan basah, sisa banjir pekan terakhir Februari 2020, yang juga menghampiri warga Jakarta Timur di Cipinang Bali, Jatinegara.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati bersama dengan BI, mengunjungi Posko Banjir Bidara Cina dan Cipinang Bali, menyampaikan bantuan dan bertemu warga, memberikan semangat.

"Banjir ini adalah ujian yang Allah SWT berikan, dan pahala bagi orang-orang beriman yang bersabar," pungkas Anis yang disambut

Ketua RT 18 dan warganya.

Anis berpesan, untuk terus berfikir positif dan fokus untuk menata masa depan yang lebih baik.

"Saya mengajak bapak dan ibu warga Jakarta untuk terus berbaik sangka dengan berpikiran baik, untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik" ujar Anis.

Pada kesempatan tersebut, Ketua RT 18 menyampaikan ucapan terimakasih, karena memberikan perhatian dan kepedulian terhadap warga terdampak banjir di wilayahnya, yang berjumlah 97 KK.

"Saya berharap Bu Anis terus semangat memperjuangkan aspirasi warga Jakarta Timur, dan senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan keberkahan," ungkap Sang Ketua RT.

Rangkaian serap aspirasi ditutup dengan kunjungan ke Posko Banjir Cipinang Bali di RW 13 yang berjumlah 199 KK, yang disambut oleh ibu-ibu warga dan ustadzah setempat, didampingi oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Jakarta Timur, Sugiyanti.



Silaturahmi dengan Tokoh Indramayu

Netty Sosialisasikan Pentingnya Ketahanan Keluarga

"Tanggung jawab Negara ini menjamin keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan segenap potensinya. Jadi, Negara tidak bisa tinggal diam

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Indramayu (08/03) — Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani bertemu dengan para tokoh perempuan Indramayu di Rumah Makan Sekar Wangi.

Pertemuan ini selain sebagai silaturahmi sekaligus serap aspirasi dari para tokoh perempuan Indramayu terutama terkait dengan keluarga, kesehatan, dan pembangunan.

"Siaturahim ini penting untuk dilakukan mengingat tokoh perempuan yang hadir ini merupakan orang yang concern dalam pendampingan masyarakat, terutama ketahanan keluarga. Apalagi beberapa hari terakhir, kita digegerkan oleh peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan berusia 15 tahun

kepada seorang anak berusia 5 tahun. Benar-benar memilukan" ujar Netty.

Diketahui, pelaku mengacu terinspirasi oleh film horor yang ditontonnya dan merasa puas setelah melakukan tindakan keji tersebut. Kemudian menyerahkan diri ke polisi esok harinya. Pelaku diketahui sebagai sosok yang cerdas dan gemar menuangkan ide dan perasaan dalam gambar dan tulisan.

"Kejadian ini kembali menjadi alarm bagi kita semua, terlebih keluarga. Anomali yang terjadi di masyarakat, muara awalnya pasti dari keluarga. Pengawasan orang tua dan pengawasan keluarga menjadi penting. Tokoh perempuan Indramayu harus mengaktivasikan

masyarakat agar dapat mendeteksi permasalahan anak dan keluarga sejak dini sehingga kejahatan dapat dicegah", tambah Netty, Legislator asal Cirebon dan Indramayu.

Ketahanan keluarga merupakan pondasi ketahanan nasional yang harus kokoh, agar dapat menangkul ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat terjadi. Baik itu berasal dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Perlu kolaborasi yang baik tidak hanya masyarakat dan pemerintah, tapi juga di dalam keluarga juga.

Selaku Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu, Tauhid menambahkan Keluarga kan pondasi sebuah Negara, kalau rapuh pondasinya maka akan runtuh bangunannya.

"Ketahanan keluarga ini tidak hanya menjadi tanggung jawab istri atau ibu saja. Butuh peran dan kontribusi yang sama besarnya dari para suami atau ayah. Sinergi yang baik antara suami dan istri atau ayah dan ibu atau orang tua dan anak-anak, maka ketahanan keluarga



dapat terwujud," ujar Tauhid.

Ketahanan keluarga, harus diperkuat dengan kehadiran Negara di dalamnya. Misalnya paradigma pembangunan berbasis keluarga. Selain itu, kehadiran Negara juga dengan membuat produk hukum sebagai dasar dalam pembangunan ketahanan keluarga, yaitu Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang sedang dalam pembahasan DPR.

Netty yang sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, menambahkan filosofis lahirnya Rancan-

gan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini adalah bahwa keluarga adalah institusi sentral dan agung yang harus mendapatkan perlindungan dan fasilitas dari Negara.

"Tanggung jawab Negara ini menjamin keluarga untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan segenap potensinya. Jadi, Negara tidak bisa tinggal diam," tegasnya.

Selengkapnya Kunjungi fraksi.pks.id

PKS Terus Perkuat Dukungan Rakyat Untuk Awasi Pemerintah

Kami hadir di sini mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A

Ketua Fraksi PKS DPR RI

SERANG (TEROPONGSENAYAN) -

-Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menghadiri sejumlah pertemuan dengan warga masyarakat yang dikemas sebagai sosialisasi kinerja Partai dan Fraksi PKS di Serang dan Cilegon Banten pada Minggu (8/3).

Sosialisasi ini sekaligus untuk memperkuat barisan rakyat bersama PKS dalam mengawasi kinerja Presiden dan pemerintahannya agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya melahirkan

kebijakan mempersulit dan msenyengsarakan rakyat.

"Kami hadir di sini mengajak masyarakat untuk bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ungkap Jazuli.

Presiden dan kabinetnya perlu kita awasi secara seksama. Maka PKS memilih berada di luar pemerintahan Pak Jokowi agar tetap ada partai yang bisa mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara

kritis dan objektif.

"Banyak kebijakan pemerintah yang perlu kita kawal bersama dan mendapat masukan secara objektif. Agar jangan menyengsarakan rakyat seperti kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri, skandal jiwasraya, dan lain-lain termasuk inisiatif pemerintah mengusulkan omnibus law. Kalau tidak ada yang bersuara lantang, rakyat bisa dirugikan, bangsa dan negara bisa dirugikan," tegas Jazuli.

Untuk itu Anggota DPR Dapil Banten II ini meminta dukungan rakyat luas agar PKS



makin kuat, makin besar, dan makin kokoh dalam melaksanakan fungsi checks and balances.

"Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, bukan. Tapi kita

sadar demokrasi butuh penyeimbang. Karena PKS relatif sendiri pada posisi ini maka PKS berharap besar dukungan rakyat luas," pungkask Jazuli.

Rafli Salurkan Modal Wirausaha Berbasis Dayah di Aceh Jaya

Kami bertugas dikomisi VI bermitra dengan seluruh BUMN, semoga ikhtiar kita bersama seperti ini, terus mampu kita lakukan guna membantu tingkatkan perekonomian dan menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat, Insyaallah,"

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Aceh

Kab. Aceh Jaya (14/03) — Anggota DPR RI Dapil 1 Aceh, Rafli bersama PT Garuda Indonesia (Persero) menyerahkan bantuan modal usaha mini market kepada Yayasan Dayah Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Mesja, Desa Jangeut, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Kamis (12/03/2020).

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) bersumber dari PT Garuda Indonesia yang merupakan mitra kerjanya di Senayan, Rafli menyebut itu sebagai Dana Kasih Sayang. "Ini

dana kasih sayang". Sebut Rafli

Rafli melanjutkan bahwa kita punya harapan besar agar dayah di Aceh sebagai basis Pendidikan Islam yang sudah mengakar, nantinya menjadi contoh wujud kemandirian ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, sambutan Rafli dihadapan santri juga menjelaskan perannya di Komisi VI DPR RI bermitra dengan seluruh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

"Kami bertugas dikomisi VI bermitra dengan seluruh BUMN,

semoga ikhtiar kita bersama seperti ini, terus mampu kita lakukan guna membantu tingkatkan perekonomian dan menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat, Insyaallah," Ujar Politisi PKS

Penyaluran bantuan berupa dana sejumlah Rp. 82.700.000 untuk modal berwirausaha bagi lembaga pendidikan dayah tersebut turut disaksaksikan Widya Kurniawan Putra, Pimpinan Pabang PT Garuda Indonesia Banda Aceh, Faisal Syamsudin, Sasi Kurniawan, Perwakilan Pusat PT Garuda Indonesia, Jakarta.

Amatan media, bantuan diterima langsung oleh Pimpinan Dayah, Asnawi Ramli atau dikenal Abah Asnawi. Ia mengungkapkan rasa bahagia atas kehadiran Rafli dan tim Garuda Indonesia

"Kami menyambut bahagia kedatangan Tgk Rafli bersama PT Garuda Indonesia, bersyukur dan berterimakasih atas perhatian bantuan ini"

Menyoal upaya pemberdayaan ekonomi,



menurut Asnawi Ramli, Dayah BUDI yang sekarang ia pimpin, merupakan Dayah yang kaya aset produktif sebelum Tsunami meluluh lantakan Aceh pada 2004.

"Dayah ini dahulu memiliki kebun rambut dan karet hingga ratusan hektar belum lagi tambak hingga usaha industri

padi termasuk terbesar pabrik yg ada di Lamno serta banyak penghasilan milik dayah, namun itu lenyap dan hilang di sapu tsunami pada 2004", Kenang Abah Asnawi

"Sekarang kita kembali mulai berbenah meski masih jauh dari kejayaan yang pernah sebelumnya" Ucapnya

Masa Reses, Fikri Hadiri Musrenbang Wilayah Jateng

Sebagai Wakil Rakyat sudah seharusnya mendengar aspirasi dari masyarakat dan Musrenbang merupakan forum perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Brebes (09/03) — Salah satu kegiatan reses Anggota DPR RI FPKS Abdul Fikri kali ini digunakan untuk menghadiri acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrebang) wilayah Jawa Tengah yang bertempat di Gedung Islamic Center Kabupaten Brebes, Kamis 5 Maret 2020 sekaligus memberikan masukan pada acara tersebut.

"Sebagai Wakil Rakyat sudah seharusnya mendengar aspirasi dari masyarakat dan Musrenbang merupakan forum perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah

desa, bekerjasama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya," ujar Fikri.

Musrebang kali ini dihadiri oleh para Anggota Dewan dari Pusat sampai Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah.

Fikri mengingatkan bahwa tahun 2021 menjadi tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah dan Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 adalah Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat yang Didukung oleh Penguatan Daya Saing SDM.

"Oleh karena itu

Musrebang yang diadakan kali ini haruslah sesuai dengan sasaran dan tujuan dari RPJMD itu sendiri, tambah Fikri.

Program dan kegiatan pembangunan Jawa Tengah haruslah tepat, sehingga output dan outcome dari pembangunan ini dapat berdampak langsung untuk masyarakat," pungkasnya.

Selain itu juga Fikri menjelaskan tentang Proses Perencanaan Pembangunan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, bahwa perencanaan pembangunan harus mencakup 5 pendekatan yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; top-down dan bottom-up.

"Banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan antar Kabupaten, permasalahan pengelolaan dan penanganan sampah sampai permasalahan pariwisata," paparnya.

Untuk itu, lanjut Fikri, agar pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengundang seluruh Anggota Dewan dari tingkat pusat sampai daerah ke daerahnya agar bersama-sama



menyelesaikan permasalahan yang ada dan memajukan daerahnya, karena PAD tidak mampu dan tidak cukup untuk mengatasi seluruh kesulitan.

"Jika kita saling bekerjasama dan melepaskan ego sektoral dalam

pembangunan daerah ini, maka seluruh permasalahan ini sya Allah dapat kita selesaikan", tutup Fikri

Reses, Rofik Dukung Program PC Muhammadiyah Mrebet Purbalingga

"Program yang dicanangkan oleh teman-teman pengurus ini sangat bagus dan mulia, saya yakin ini akan terwujud apabila semua pihak berkerjasama dan berperan dalam program pembangunan panti asuhan ini

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (09/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto melakukan audiensi dengan Pengurus Cabang Muhammadiyah Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga di RM Kebon Eyang Mrebet.

Acara ini diisi dengan Diskusi, serap aspirasi dan pemaparan program Pembangunan Panti Asuhan oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Mrebet.

Rofik mengapresiasi dan

mendukung program-program yang dicanangkan oleh teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Muhammadiyah Mrebet. Rofik yakin, dengan kerja sama dan peran dari semua pihak program ini akan terwujud.

"Program yang dicanangkan oleh teman-teman pengurus ini sangat bagus dan mulia, saya yakin ini akan terwujud apabila semua pihak berkerjasama dan berperan dalam program pembangunan panti asuhan ini." Tutur Rofik

Rofik juga Mengutip pesan Pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan: "Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah."

Rofik mengingatkan agar teman-teman pengurus terus berkhidmat kepada umat, dengan segala potensi yang ada dan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia.

Pada kesempatan ini Rofik memberikan bantuan untuk pembangunan panti asuhan muhammadiyah di Kec. Mrebet senilai Rp. 10 Juta Rupiah.



Reses Anggota DPR RI, Alifuddin Kunjungi Pemkab Bengkayang

Terimakasih pada Pemkab Bengkayang, yang hari ini dapat memberikan waktunya kepada kami, semoga dengan ada nya pertemuan kali ini saya bisa mendapatkan info dan data dari pemkab terkait, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain lain terkait wilayah kerja komisi IX DPR RI

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Bengkayang (09/03) —
Memanfaatkan Masa reses DPR RI periode persidangan ke dua yang jatuh pada bulan maret ini, dimanfaatkan dengan maksimal oleh Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalbar.

Usai bertemu dengan konstituen di Kabupaten Bengkayang, Alifudin melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Bengkayang pada Hari Senin (9/3/2020) di kantor Bupati Bengkayang.

Alifudin ditemui langsung Asisten Administrasi dan Umum,

Ucok P. Hasugian, dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Bengkayang Rosalina Nungkat beserta jajaran staf kepegawain pemkab Bengkayang. Dalam sambutannya Alifudin, mengatakan tujuan kunjungan ke kabupaten bengayang selain menemui konstituen, juga ingin mendapatkan informasi dan masukan langsung dari Pemkab terkait wilayah kerja komisi IX.

"Terimakasih pada

Pemkab Bengkayang, yang hari ini dapat memberikan waktunya

kepada kami, semoga dengan ada nya pertemuan kali ini saya bisa mendapatkan info dan data dari pemkab terkait, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain lain terkait wilayah kerja komisi IX DPR RI," ujarnya.

Rosalina Nungkat, Kadis kesehatan Bengkayang menyampaikan pemkab sudah melaksanakan sosialisasi S.E Kementerian Kesehatan mengenai antisipasi Covid.19 dan bila ada pasien yg tersuspek di Bengkayang akan langsung di rujuk di RS. Abdul Aziz Singkawang dan stok masker di Bengkayang menipis.

"Bengkayang butuh citiscan, Bengkayang termasuk daerah yang riskan virus corona karena banyak jalan tikus keluar masuk TKA di wilayah Bengkayang dan ada TKA asal Tiongkok yaitu di PLTU, dan sudah dilakukan koordinasi mengenai pencegahan covid.19," Ujar Rosalina Nungkat.

Selain masalah penanganan virus corona, Alifudin juga menerima



masukan terkait BPJS dan Ketenaga kerjaan.

"Ada banyak masukan dan aspirasi juga dari pemkab Bengkayang, terkait BPJS seperti ini perlu ada penanganan khusus dari BPJS Provinsi, karena tadi infonya

agak kurang harmonis ini, selain itu juga jumlah tenaga kerja Bengkayang yang sekitar 12 ribu orang, perlu ditambah skillnya dengan penambahan Balai Latihan Kerja (BLK), dan seperti ini pemkab sangat butuh juga BLK," pungkasnya.

PKS Akan Kawal Putusan MA Terkait BPJS Kesehatan

“Alhamdulillah, MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan Presiden terkait kenaikan iuran BPJS tersebut. PKS akan mengawal keputusan MA agar dapat terlaksana di lapangan. Masyarakat tentu gembira dengan keputusan MA yang bersifat final ini

**Dr. H. MULYANTO,
M.Eng**

Wakil Ketua Fraksi PKS PKS DPR RI

Tangerang (11/03) – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Mulyanto menegaskan, partainya akan mengawal putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75, Tahun 2019 tentang Kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Alhamdulillah, MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan Presiden terkait kenaikan iuran BPJS tersebut. PKS akan mengawal keputusan MA agar dapat terlaksana di lapangan. Masyarakat tentu gembira dengan keputusan MA yang bersifat final ini,” ungkap Mulyanto di hadapan konstituennya saat mengadakan Reses di Kresek, Kabupaten Tangerang, Senin lalu (09/03/2020).

Mulyanto juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS akan terus berjuang membela aspirasi masyarakat.

Bersamaan dengan kegiatan reses, Mulyanto bersama pengurus dan kader PKS Kresek juga mengadakan bakti sosial pemeriksaan mata gratis dan kacamata murah untuk masyarakat.



Ketua DPC PKS Kecamatan Kresek, Himawan Sutanto menyebutkan bahwa kegiatan baksos yang dibarengi dengan reses ini merupakan bentuk khidmat PKS kepada masyarakat.

“Salah satu bentuk kepedulian PKS dalam rangka berkhidmat untuk masyarakat

dan umat,” kata Himawan.

Masyarakat tampak antusias menghadiri reses dan bakso tersebut. Sekitar 100 warga datang beramai-ramai menyampaikan aspirasinya dan memeriksa kesehatan mata secara gratis.

Mulyani, salah seorang warga yang hadir sangat senang

dengan kegiatan reses yang dibarengi dengan baksos.

“PKS sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak mengenal waktu”, tuturnya.

Sakinah Al-Jufri Reses Bersama Guru di Kabupaten Tojo

Saya merasa bangga dan mengapresiasi pembangunan kantor WIA Tojo Unauna yang ternyata dibangun dari hasil sumbangan ibu-ibu setiap Jumat ini. Semoga sumbangan Ibu-ibu dan para donatur sekalian, bisa menjadi amal jariyah

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Kabupaten Tojo (13/03) — anggota Komisi X DPR-RI, Sakinah Aljufrie, berkunjung dalam rangka perjalanan resesnya di Kabupaten Tojo Unauna (Touna), tepatnya di Desa Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Senin (09/03/2020).

Di Uentanaga tersebut, terdapat salah satu TK Alkhairaat yang merupakan binaan langsung Wanita Islam Alkhairaat Kabupaten Touna. Di TK yang telah berdiri sejak 1991 tersebut, ternyata telah banyak mengukir prestasi.

"Alhamdulillah, kami pernah juara satu lomba sekolah sehat tingkat kabupaten pada 2019. Kemudian Juara satu guru prestasi juga tingkat kabupaten pada 2016. Di 2010, guru kami meraih runner up lomba melukis dan pada 2005, kami meraih juara satu melukis kategori anak untuk putra dan putri," kata Kepala TK Alkhairaat Uentanaga, Irma Maraba di depan Sakinah Al-Jufri.

Selain itu kata Irma, sekolah yang dipimpinnya, di 2016, juga pernah meraih juara

II dalam lomba tari kreasi tingkat provinsi, serta juara tiga busana daerah juga di tingkat provinsi. Setahun kemudian, atau pada 2017, siswa TK Alkhairaat Uentanaga meraih juara satu melukis putri.

Prestasi demi prestasi yang diraih ini, membuat Hj Sakinah yang juga Sekjen PB WIA, mengaku bangga, ada sekolah yang merupakan binaan WIA Kabupaten Touna, siswa dan gurunya mengukir prestasi gemilang.

Dalam resesnya di Touna, Sakinah selain bertatap muka dengan warga dalam rangka menjangkau aspirasi, juga secara khusus melakukan peninjauan pembangunan kantor WIA Kabupaten Touna. Lagi-lagi Sakinah terharu, ketika mendengarkan informasi, bahwa pembangunan kantor WIA Touna, sumber pembiayaannya didapatkan dari hasil sumbangan ibu-ibu pengurus, anggota dan simpatisan WIA yang dikumpulkan setiap Jumat.

"Selaku Sekjen WIA Pusat,



tentu saya merasa bangga dan mengapresiasi pembangunan kantor WIA Tojo Unauna yang ternyata dibangun dari hasil sumbangan ibu-ibu setiap Jumat ini. Semoga sumbangan Ibu-ibu dan para donatur sekalian, bisa menjadi catatan amal jariyah," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut Sakinah

Aljufri, menyerahkan dana bantuan penyelesaian bangunan kantor WIA Tojo Unauna.

"Hal ini kami lakukan, sebagai bentuk kepedulian kami, terhadap perkembangan dan kemajuan Wanita Islam Alkhairaat, khususnya di Kabupaten Touna ini," tutupnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Ahmad Syaikhul

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

**Masa Reses, Ahmad
Syaikhul Tebar 50.000
Benih Ikan Nila di
Kab. Bekasi**

Setelah menebar benih, tugas kita selanjutnya adalah menjaga situ. Berikan rambu-rambu peringatan sebagai bahan edukasi. Agar tidak ada masyarakat yang mengambil ikan dengan cara diracun dan disetrum,"



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA

Kompetisi Catur Bersama Warga

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) memanfaatkan waktu resesnya untuk mengikuti kompetisi catur bersama warga di Jakarta Selatan, Sabtu, (29/02/2020). HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan bahwa Catur sebagai olahraga sangat baik dikembangkan.

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si.

Media Gathering

Jakarta (02/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta I Anis Byarwati menyelenggarakan Media Gathering bersama para awak media di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2020). pada kesempatan tersebut, Anis menyinggung persoalan ekonomi nasional yang sudah goyang tanpa adanya wabah virus Corona. Walaupun, diakui Anis, wabah virus Corona mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP,MM

Kunker tempat lelang Ikan (TPI) Lonrae

Makassar (03/03) – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengta melakukan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Rabu (03/03/2020). Dalam kunjungan itu, Andi Akmal mensosialisasikan program Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makanan Ikan).



Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si

Hadiri Sarasehan DN-PIM

Jakarta (08/03) — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati berkesempatan hadir pada acara Sarasehan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) yang diketuai Prof. Din Syamsuddin. Kamis, (05/03/2020).



H. Johan Rosihan, S.T.

Reses, terima keluhan kelangkaan pupuk

Jakarta (08/03) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengisi masa resesnya dengan mengunjungi menemui petani di ladang jagung. Johan mende-ngar langsung keluhan mereka di lahan. Hanging ini pertumbu-hannya lambat karena terkena penyakit. mereka mengeluhkan pula soal kelangkaan pupuk serta sulitnya mendapatkan bantuan bibit. Johan berharap semoga bisa segera diurai persoalan itu.



H.M. Nasir Djamil, M.Si

Menerima Aspirasi CDDB Kota Pantan Labu

Aceh (15/3) — Anggota DPR RI Dapil Aceh Nasir Djamil bertemu dengan tim penggagas Calon Daerah Otonomi Baru (CDDB) Kota Pantan Labu, Provinsi Aceh dan para tokoh masyarakat sekitar. Nasir menerima langsung aspirasi warga terkait rencana pemekaran daerah tersebut. dirinya berpesan aspirasi dan semangat pemekaran haruslah disasari untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

OLEH-OLEH DAPIL

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H.M. Nasir Djamil, M.Si

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si

Menerima Aspirasi CDOB Kota Pantan Labu

Aceh (15/3) — Anggota DPR RI Dapil Aceh Nasir Djamil bertemu dengan tim penggagas Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Pantan Labu, Provinsi Aceh dan para tokoh masyarakat sekitar. Nasir menerima langsung aspirasi warga terkait rencana pemekaran daerah tersebut. dirinya berpesan aspirasi dan semangat pemekaran haruslah disasari untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Safari Kebangsaan ke Partai Demokrat

Cikeas (12/3) - Partai Keadilan Sejahtera melanjutkan safari kebangsaan ke sejumlah parpol. Malam ini PKS bertemu SBY dan Partai Demokrat di kediaman SBY Puri Cikeas. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden PKS dan jajaran DPP PKS, dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Sementara SBY didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan jajaran pimpinan PD.

Sosialisasi Gerakan Non Tunai

Jakarta (12/03) — Mengisi masa reses, Anis Byarwati anggota komisi XI DPR RI melakukan sosialisasi program BI dengan tema Penguatan Gerakan Non Tunai Sebagai Alat Transaksi Modern. Anis mengatakan bahwa secara global dunia sedang menuju kepada transaksi non tunai.



H. Rofik Hananto, S.E

Kunker ke Dinas Perhubungan Purbalingga

Purbalingga (11/03) — Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan, Yani Sutrisno Udhinugroho, S.Sos. pada Rabu 11 Maret 2020. Dalam kunjungan tersebut dibahas banyak hal terkait program-program Komisi VII kedepan, salah satunya Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUU-TS),



Dr. H. A. Akmal Pasluddin, SP,MM

Permudah Nelayan Peroleh KUR

Bone (10/03) — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin hadir dalam acara sosialisasi dan pelaksanaan program prioritas perikanan tangkap kepada nelayan, Senin (09/03/2020). Acara tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Hj Wahidah, Kepala SUPM Bone, Direktur Politeknik Kabupaten Bone dan legislator DPRD Bone.



H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

Silaturahmi dengan Pemkab Inhil

Tembilahan (14/03) — Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau 2, Syahrul Aidi Maazat terus melaksanakan agenda roadshow seluruh kabupaten yang tergabung dalam Dapil Riau 2. Hal itu dalam rangka melaksana-nakan agenda reses masa sidang kedua tahun 2020.



Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP,MM

Serahkan bantuan untuk Nelayan

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut ke sejumlah nelayan. Bantuan yang diserahkan antara lain premi asuransi nelayan sebanyak 1.797 nelayan, 100 bidang penerbitan sertipikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan bagi 150 nelayan.

H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

Kunjungi Masyarakat Pasca Banjir Subang

Subang (11/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, H. Nurhasan Zaidi, mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat, Selasa (10/13/20). Dalam kunjungannya, Anggota DPR dari daerah pemilihan Subang, Majalengka ini menyerahkan paket sembako dari kemensos dan bantuan renovasi rumah (BSPS) dari kementerian PUPR untuk masyarakat.

H. Ahmad Syaikhul

Tebar 50.000 Benih Ikan Nila di Kab. Bekasi

Kabupaten Bekasi (11/03) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul mengisi masa resesnya dengan menebar 50.000 benih Ikan Nila. Kegiatan itu berlangsung di Danau Binong, Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Syaikhul diundang oleh Direktur Bumdesa Bermutu Cikarang Pusat Doni Ardin. Tebar benih dilakukan untuk restocking bibit ikan di danau tersebut.



Amin AK,M.M.

Membatik bareng Millenial

Jember (10/03) - Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak bertemu dengan kalangan milenial di Jember, Jawa Timur dalam rangka kunjungan reses di daerah pemilihan, Selasa (10/3/2020) pagi ini.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Haul Abah Guru Sekumpul Ke 15

Kalimantan (02/03) — Dalam rangkaian reses, Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menghadiri Haul sekumpul yang juga dihadiri para habaib dan ulama di Kalimantan, Ahad, (01/03/2020). Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyatakan Haul sekumpul ini membawa makna yang mendalam untuk bangsa dan negara.



Hj. Nevi Zuairina

Temu Masyarakat Padang Pariaman

Padangpariaman (09/03) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina bertemu dengan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bertempat di kantor wali nagari sungai asam, kec enam ling-kung pada 8 maret 2020. Berbagai tokoh masyarakat pun turut hadir untuk bertemu ketua UMKM Sumbar ini untuk berdialog dan menyam-paikan pendapat sebagai aspirasi warga.

PROFIL

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.



Kuatkan Ketahanan
Kesehatan
KELUARGA

Berbicara tentang kesehatan nampaknya saat ini cocok jika rekan dan sahabat Fraksi PKS berkenalan dengan DR.Hj. Kurniasih Mufidayati Msi, Anggota FPKS Komisi IX DPR RI. Sosok yang akan diulas pekan ini dalam program #KeluargaPKS. Mba fida - sapaan akrab- merupakan satu dari delapan srikandi tangguh milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mentas di Senayan. Terpilih sebagai wakil rakyat dari Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri).

Kepribadiannya "renyah, rapih, ramah loh jinawi", Sangat

mudah bergaul dan murah senyum. Namun demikian karakter tegas dan integritas kuat melekat erat dalam diri mba fida. Liat saja bagaimaai getol serta gigihnya wanita kelahiran Pekalongan 50 tahun lalu ini menggedor BPJS dan Kemenkes agar luran BPJS kelas III tidak naik. Ibarat pepatah, pantang kapal surut ke pantai jika layar telah terkembang. *Blidznillah*

Kegigihan juga nampak dari perjalanan mba Fida menapaki jenjang pendidikan, tercatat gelar sarjana dari IKIP Semarang Bahasa Inggris, S 2 Universitas Indonesia Ilmu

Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, dan S 3 Universitas Indonesia Ilmu Administrasi.

Mba fida punya empat buah hati, masing-masing dua putri dan dua putra yaitu Madina Salma Karimah, Fitri Karimah, Abdullah Hisyam dan Abdullah Royan. Pasangan dari M.Farid Wajdi ini sosok ibu yang menginspirasi bagi putra putrinya. Ditengah kesibukan sebagai dosen, pengelola pendidikan dan kini jadi Anggota DPR RI, keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kariernya.

Pesan bagi keluarga Indonesia Mari kita wujudkan ketahanan keluarga Indonesia, salah satunya dengan menguat-kan ketahanan kesehatan keluarga. Terapkan Pola Hidup Sehat dan Bersih dan tumbuh kembangkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat Ruhani dan Jasmani. Keluarga adalah Masa Depan Ummat dan Bangsa. Kualitas Keluarga adalah bekal kehidupan kekal kita di akhirat. Yuuk kita wujudkan Keluarga yang SEHATI (Sehat berHati lembut berلمان kuat)

SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Kurniasih Mufidayati dapat mengikuti social media:

Facebook: Kurniasih Mufidayati
Twitter : @mufidayati_id
IG : @kurniasihmufidayati.id



”

Kualitas Keluarga adalah bekal kehidupan kekal kita di akhirat. Yuuk kita wujudkan Keluarga yang SEHATI (Sehat berHati lembut berلمان kuat)



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI